

**PELUANG DAN TANTANGAN PERJANJIAN REGIONAL
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DALAM
BIDANG NON MIGAS BAGI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

AHMAD RIZKY GHOZALI

I72218033

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Rizky Ghozali

NIM : 172218033

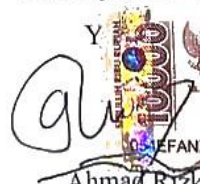
Prodi : Hubungan Internasional


Judul Skripsi “Peluang dan Tantangan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Dalam Bidang Non Migas Bagi Indonesia”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun
2. Skripsi ini benar benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain
3. Apabila Skripsi ini kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 30 Desember 2022


Ahmad Rizky Ghozali
172218033



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Rizky Ghozali

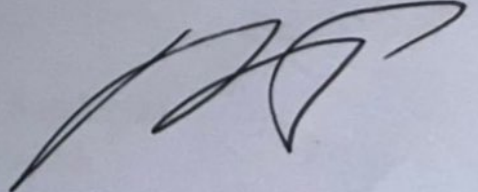
NIM : I72218033

Progam studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul **“Peluang dan Tantangan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Dalam Bidang Non Migas Bagi Indonesia”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam Hubungan Internasional.

Surabaya,

Dosen Pembimbing



Moh. Fathoni Hakim, M. Si

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Ahmad Rizky Ghozali dengan judul —Peluang dan Tantangan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Dalam Bidang Non Migas Bagi Indonesia Tahun 2018-2022 telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 30 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Moh. Fathoni Hakim, M.Si
NIP.198401052011011008

Penguji III



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP.199003252018012001

Penguji II



Ridha Amalivah, S.IP, MBA
NIP.201409001

Penguji IV



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP.199104092020121012

Surabaya, 30 Desember 2022

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Prof. Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag.
NIP.197306272000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD RIZKY GHOZALI
NIM : I72218033
Fakultas/Jurusan : FISIP / HUBUNGAN INTERNASIONAL
E-mail address : RIZKYGHOZALI69@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peluang Dan Tantangan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Dalam Bidang Non Migas Bagi Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Penulis

Ahmad Rizky Ghozali

ABSTRACT

Ahmad Rizky Ghozali, 2023. Opportunities and Challenges of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) in the Non-Oil and Gas Sector for Indonesia

This research aims to analyze the extent of Opportunities and Challenges of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement in the Non-oil and gas Sector for Indonesia. RCEP as the largest trade bloc in the world creates opportunities for its member countries, including Indonesia, to expand market access, improve logistics efficiency, and strengthen regional supply chain integration. This research utilizes the literature study method by reviewing various academic literatures, official government reports, and statistical data on Indonesia's non-oil and gas exports. In addition, primary data is supplemented through online interviews with officials from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The results show that RCEP offers opportunities in the form of tariff preferences and increased foreign direct investment (FDI), but Indonesia still faces challenges such as low business literacy towards RCEP, export infrastructure gaps, and intense competition from partner countries. Therefore, affirmative policies are needed, especially to support MSMEs to optimally utilize RCEP.

Keywords: RCEP, non-oil and gas export, ASEAN, international trade, Indonesia

ABSTRAK

Ahmad Rizky Ghozali, 2023 . *Pemanfaatan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam bidang Non Migas bagi Indonesia.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Peluang dan Tantangan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam Bidang Non-migas bagi Indonesia. RCEP sebagai blok perdagangan terbesar di dunia menciptakan peluang bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat integrasi rantai pasok regional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur akademik, laporan resmi pemerintah, serta data statistik ekspor non-migas Indonesia. Selain itu, data primer dilengkapi melalui wawancara daring dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RCEP menawarkan peluang berupa preferensi tarif dan peningkatan investasi asing langsung (FDI), namun Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi pelaku usaha terhadap RCEP, kesenjangan infrastruktur ekspor, dan ketatnya persaingan dari negara mitra. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif, khususnya untuk mendukung UMKM agar dapat memanfaatkan RCEP secara optimal.

Kata Kunci: RCEP, ekspor non-migas, ASEAN, perdagangan internasional, Indonesia

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Manfaat Teoritis.....	10
F. Manfaat Praktis.....	10
G. Tinjauan Pustaka	10
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26
KERANGKA KONSEPTUAL.....	26
A. Free Trade Agreement (FTA).....	27
B. Analisis SWOT	30
C. Pemanfaatan Perjanjian RCEP dalam Sektor Non-Migas	33
D. Kerangka Konseptual.....	37
Pemanfaatan Perjanjian RCEP dalam Sektor Non-Migas	37
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Tingkat Analisa	41
D. Tahap Penelitian	42
E. Tahap Pengolahan Data	44
BAB IV	46
PEMBAHASAN	46
A. RCEP sebagai FTA Multilateral	47
B. Peta Sektor Non-Migas Sebelum dan Sesudah RCEP.....	54
C. Potensi Komoditas Non-Migas Indonesia Sebelum RCEP	78
D. Peluang dan Tantangan Ekspor Non-Migas Indonesia dalam Kerangka RCEP	81
E. Analisis SWOT terhadap Ekspor Non-Migas Indonesia dalam Kerangka RCEP	87
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	87

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1: Data Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Tahun 2021</i>	5
<i>Tabel 1.2 : Total Ekspor Non-Migas Tahun 2021</i>	6
<i>Tabel 1.3 : Negara Tujuan Ekspor Migas dan Non Migas Tahun 2021</i>	7
<i>Tabel 4.1: Nilai Ekspor Non-Migas Indonesia 2018–2022 (US\$ miliar)</i>	55
<i>Tabel 4.2 Surplus Perdagangan Non-migas</i>	60
<i>Tabel 4.3 Surplus Perdagangan Non-migas</i>	61
<i>Tabel 4.4 Data Ekspor</i>	63
<i>Tabel 4.5 Mitra Dagang Ekspor</i>	64
<i>Tabel 4.6 Data Tujuan Produk Unggulan</i>	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang sedang terjadi saat ini membawa banyak perubahan untuk dunia. Mulai dari kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, kemajuan politik, kemajuan perdagangan dan kemajuan-kemajuan lainnya. Dalam keadaan yang serba berkemajuan ini banyak negara-negara yang berlomba-lomba melakukan berbagai kerja sama yang saling menguntungkan¹. Namun saat ini ekonomi global sedang mengalami kontraksi minus sebesar 3,2% dari sisi pertumbuhannya akibat pembatasan mobilitas yang menjadi faktor kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus Covid-19. Dalam sektor pertumbuhan perdagangan dunia juga mengalami kemerosotan yang biasanya peningkatan mencapai dua digit, pada masa pandemi mengalami kontraksi minus 8,3%. Permasalahan ini juga menjadi penyebab kondisi ekonomi Indonesia menurun, pada tahun 2019 kuartal kedua PDB riil Indonesia adalah Rp2.735 triliun, sedangkan pada pandemi tahun 2020 kuartal kedua PDB riil Indonesia mengalami kontraksi minus dengan nilai menjadi Rp2.590 triliun. Tentu ini menjadi sebuah tantangan untuk pemerintah dalam menangani merosotnya ekonomi di masa pandemi, namun melalui penerapan dan pengawasan protokol kesehatan dapat sedikit mengendalikan perputaran ekonomi. Kondisi ini juga mendorong negara-negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi regional dan

¹Salvatore, Dominick. 2004. International Economics. Eleventh Edition, Fordham University, USA: John Wiley & Sons, 133.

mencari sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak pemulihan, salah satunya adalah sektor non-migas

Bersamaan dengan itu, banyak negara juga berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi global agar tidak terlalu merosot. Di tengah merosotnya ekonomi Indonesia, angin segar datang dari neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus pada tahun 2020 sebesar USD 21,7 menjadi yang tertinggi sejak tahun 2012. Naiknya beberapa harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit dan batu bara membuat nilai ekspor nonmigas melonjak tajam. Selama tahun 2020 ekspor hanya turun 2,6% (YoY), sementara itu di tahun yang sama nilai impor menurun sebesar 17,3% (YoY).² Ada lima produk ekspor yang mempunyai nilai pertumbuhan positif tertinggi di tahun 2021 (YoY) didominasi nonmigas oleh non migas dengan nilai 34,08%, produk tersebut ialah bahan bakar mineral dengan jumlah 18.95%, lemak dan minyak nabati 12.61%, besi dan baja 10.19%, mesin/peralatan listrik 5.15%, dan kendaraan dan bagiannya 3.77%.³ Naiknya neraca perdagangan Indonesia tentunya menjadi angin segar bagi pemerintah dalam penanganan tren menurunnya ekonomi Indonesia. Ditengah masa pandemi dimana seluruh negara mengeluarkan batasan akses untuk keluar masuk negaranya, baik ekspor maupun impor yang menjadikannya sebagai hambatan tersendiri. Pemerintah negara yang saling memproteksi warga negaranya dari penyebaran virus ini diharapkan dapat membaik dalam segi ekonomi kedepannya. Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia,

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/15/tren-ekspor-dan-impor-indonesia-sepanjang-2020>

³<https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-komoditi>

Muhammad Lutfi “untuk mencapai target pertumbuhan nilai ekspor nonmigas, indonesia harus membuka pasar dan bekerjasama dengan beberapa negara dalam perjanjian dagang yang sudah ada salah satunya ialah perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal itu sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah masing masing produk yang akan diekspor. Kemudian Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menegaskan bahwasanya perjanjian perdagangan RCEP akan membawa keuntungan bagi negara Indonesia dikarenakan Negara negara sebagai anggota maupun mitra memiliki nilai pasar 29,% penduduk dunia dan 29% Produk Domestik Bruto dunia. Terlebih lagi peluang tersebut terhadap Ekspor diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan sebesar 8%-11% karena peran Indonesia mengalami perluasan melalui global supply chain dari spill over effect yang berpotensi untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2%. Negara yang bermitra di RCEP berada di atas Indonesia seperti China, Malaysia, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, Jepang dan Singapura. Ditambah lagi Ekspor Non Migas ke negara Tiongkok merupakan yang terbesar diperkirakan mencapai US\$5,41 miliar. Disusul ekspor Non Migas Indonesia ke wilayah ASEAN sebesar US\$4,14.⁴ miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan dalam meningkatkan volume Ekspor terlepas pandemi yang memang menyulitkan karena berdampak pada perekonomian dunia. Dengan adanya perjanjian RCEP ini maka peluang untuk membuka pasar terhadap peningkatan volume Ekspor Non Migas akan terbuka lebar. Namun, pemanfaatan peluang ini juga menuntut

⁴<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/12/15/1829/ekspor-november-2021-mencapai-us-22-84-miliar-dan-impor-november-2021-senilai-us-19-33-miliar.html>

kesiapan dan adaptasi Indonesia dalam menghadapi dinamika persaingan serta berbagai tantangan yang mungkin muncul dari implementasi perjanjian sebesar RCEP.

Dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Kemendag berupaya meningkatkan nilai ekspor non-migas melalui optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, termasuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP merupakan *trading block* terbesar di dunia, mencakup 30% PDB global, 27% perdagangan dunia, 29% populasi, dan 29% investasi asing langsung. Meskipun berakar dari inisiatif negara-negara ASEAN, pembentukan RCEP yang melibatkan 15 negara mitra (termasuk Australia, Selandia Baru, RRT, Jepang, dan Korea Selatan) bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi regional yang lebih luas. Kesepakatan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan RCEP, termasuk Indonesia, dengan mendorong ekspor non-migas ke berbagai negara mitra dagang. Potensi ekonomi RCEP yang mencakup sekitar 3,2 miliar jiwa penduduk dan PDB senilai USD 20 triliun semakin menegaskan pentingnya perjanjian ini sebagai jalan bagi negara anggota untuk memperkuat kerja sama dan investasi

Pada mulanya perjanjian ini di gagas pada tahun 2012, ada sebanyak 16 negara sebagai anggota RCEP mengesahkan sebuah Guiding Principles and Objectives untuk melakukan sebuah negosiasi terkait RCEP ini. Dengan adanya RCEP diharapkan juga agar tidak menghilangkan perjanjian ASEAN plus one yang sudah pernah diadakan dengan negara negara yang bekerja sama. Namun pada akhirnya India mengurungkan diri mengikuti perjanjian RCEP dan total

anggota menjadi 15.⁵ RCEP sendiri memiliki tujuan untuk menghapuskan hambatan tarif dan non tarif. Selain itu RCEP juga menjadi fasilitator dan meningkatkan transparansi perdagangan antar negara-negara yang menjadi anggotanya. Integrasi ekonomi yang lebih komprehensif merupakan prinsip utama dari RCEP, prinsip ini sejalan dengan ketentuan World Trade Organization (WTO) dan komitmen yang lebih baik dari kerjasama perdagangan bebas yang telah ada. Diharapkan pembentukan RCEP mampu untuk menjadikan kawasan RCEP sebagai pusat dari perdagangan dunia. Hal tersebut akan berdampak terhadap kemudahan bagi negara anggota untuk mendapatkan pasokan bahan baku terutama bagi negara Indonesia.

Uraian	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Jan-Des 2021 (%)
	Des 2020r	Jan-Des 2020r	Nov 2021	Des 2021*	Jan-Des 2021*	Des'21 thd Des'20 (y-on-y)	Des'21 thd Nov'21 (m-to-m)	Jan-Des'21 thd Jan-Des'20 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	16.539,6	163.191,8	22.844,4	22.377,8	231.540,8	35,30	-2,04	41,88	100,00
Migas	1.018,8	8.251,1	1.332,4	1.093,4	12.275,6	7,33	-17,93	48,78	5,30
- Minyak mentah	391,1	1.396,9	120,9	115,7	2.795,9	-70,41	-4,27	100,16	1,21
- Hasil minyak	116,0	1.456,5	250,4	185,5	1.996,7	59,94	-25,90	37,08	0,86
- Gas	511,7	5.397,7	961,1	792,2	7.483,0	54,82	-17,58	38,63	3,23
Nonmigas	15.520,8	154.940,7	21.512,0	21.284,4	219.265,2	37,13	-1,06	41,52	94,70

Tabel 1.1 Data Nilai Ekspor Migas dan Non Migas 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik

Ekspor nonmigas Desember 2021 mencapai US\$21,28 miliar, turun 1,06 persen dibanding November 2021, dan naik 37,13 persen dibanding ekspor nonmigas Desember 2020⁶. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan

⁵ <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/antar-dan-sub-regional-asean/rcep>

⁶ Berita Resmi Statistik, No. 05/01/Th. XXV, 17 Januari 2022.

Januari–Desember 2021 naik 35,11 persen dibanding periode yang sama tahun 2020, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 2,86 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 92,15 persen⁷.

Golongan Barang (HS 2 Diji)	Nilai FOB (juta US\$)		Perubahan		Nilai FOB (juta US\$)		Perubahan (%)	Peran thd total ekspor Nonmigas Jan–Des 2021 (%)
	Nov 2021	Des 2021*	Nilai	(%)	Jan–Des 2020*	Jan–Des 2021*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Bahan bakar mineral (27)	4.130,4	3.250,0	-880,4	-21,32	17.255,1	32.836,3	90,30	14,98
2. Lemak dan minyak hewan/nabati (15)	2.546,1	2.974,9	428,8	16,84	20.716,4	32.831,7	58,48	14,97
3. Besi dan baja (72)	2.005,1	2.326,8	321,7	16,05	10.861,6	20.949,8	92,88	9,55
4. Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (85)	1.060,6	1.232,7	172,1	16,23	9.232,7	11.798,8	27,79	5,38
5. Berbagai produk kimia (38)	638,7	721,3	82,6	12,93	3.795,9	6.905,4	81,92	3,15
6. Bijih logam, terak dan abu (26)	754,1	572,6	-181,5	-24,07	3.235,1	6.351,1	96,32	2,90
7. Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	559,2	262,9	-296,3	-52,98	8.222,5	5.417,7	-34,11	2,47
8. Nikel dan barang daripadanya (75)	143,1	235,6	92,5	64,62	808,4	1.284,5	58,89	0,59
9. Kakao dan olahannya (18)	146,8	97,4	-49,4	-33,69	1.244,2	1.207,8	-2,92	0,55
10. Pupuk (31)	91,2	36,8	-54,4	-59,67	701,6	863,7	23,10	0,39
Total 10 Golongan Barang	12.075,3	11.711,0	-364,3	-3,02	76.073,5	120.446,8	58,33	54,93
Lainnya	9.436,7	9.573,4	136,7	1,45	78.867,2	98.818,4	25,30	45,07
Total Ekspor Nonmigas	21.512,0	21.284,4	-227,6	-1,06	154.940,7	219.265,2	41,52	100,00

Tabel 1.2 Total Ekspor Non Migas 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik

Penurunan terbesar ekspor nonmigas Desember 2021 terhadap November 2021 terjadi pada bahan bakar mineral US\$880,4 juta (21,32 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati US\$428,8 juta (16,84 persen). Penurunan dan kenaikan sepuluh komoditas (golongan barang) dapat dilihat pada Tabel diatas.⁸

Komoditas lainnya yang juga menurun nilai ekspornya adalah logam mulia dan perhiasan/ permata US\$296,3 juta (52,98 persen); bijih logam, terak

⁷ Ibid.

⁸ Berita Resmi Statistik, No. 05/01/Th. XXV, 17 Januari 2022.

dan abu US\$181,5 juta (24,07 persen); pupuk US\$54,4 juta (59,67 persen); serta kakao dan olahannya US\$49,4 juta (33,69 persen). Sementara komoditas yang meningkat selain lemak dan minyak hewan/nabati adalah besi dan baja US\$321,7 juta (16,05 persen); mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya US\$172,1 juta (16,23 persen); nikel dan barang daripadanya US\$92,5 juta (64,62 persen); serta berbagai produk kimia US\$82,6 juta (12,93 persen).⁹ Selama Januari–Desember 2021, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 digit) di atas memberikan kontribusi 54,93 persen terhadap total ekspor nonmigas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang tersebut naik 58,33 persen terhadap periode yang sama tahun 2020.¹⁰

Negara Tujuan	Nilai FOB (juta US\$)		Perubahan		Nilai FOB (juta US\$)		Perubahan (%)	Peran thd total ekspor Nonmigas Jan–Des 2021 (%)
	Nov 2021	Des 2021*	Nilai	%	Jan–Des 2020*	Jan–Des 2021*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASEAN	4.142,1	3.934,5	-207,6	-5,01	32.539,3	41.816,5	28,51	19,07
1. Singapura	742,5	755,3	12,8	1,71	8.533,3	8.095,4	-5,13	3,69
2. Malaysia	1.195,6	971,5	-224,1	-18,74	6.970,2	10.637,2	52,61	4,85
3. Thailand	475,4	571,8	96,4	20,27	4.543,3	5.874,4	29,30	2,68
ASEAN Lainnya	1.728,6	1.635,9	-92,7	-5,36	12.492,5	17.209,5	37,76	7,85
Uni Eropa	1.800,9	1.708,2	-92,7	-5,15	13.024,1	17.890,7	37,37	8,16
4. Jerman	274,4	285,6	11,2	4,07	2.456,3	2.909,7	18,46	1,33
5. Belanda	445,8	478,9	33,1	7,44	3.057,5	4.532,2	48,23	2,07
6. Italia	307,7	248,0	-59,7	-19,40	1.746,2	2.792,3	59,90	1,27
Uni Eropa Lainnya	773,0	695,7	-77,3	-10,01	5.764,1	7.656,5	32,83	3,49
Negara Utama Lainnya	12.344,8	12.233,6	-111,2	-0,90	83.374,4	124.128,7	48,88	56,61
7. Tiongkok	5.411,4	5.101,0	-310,4	-5,74	29.936,4	51.105,3	70,71	23,31
8. Jepang	1.645,2	1.695,1	49,9	3,03	12.885,3	16.876,7	30,98	7,70
9. Amerika Serikat	2.539,8	2.640,6	100,8	3,97	18.622,4	25.773,8	38,40	11,75
10. India	1.165,1	1.188,2	23,1	1,99	10.179,0	13.059,9	28,30	5,96
11. Australia	267,9	235,7	-32,2	-12,03	2.415,4	2.995,3	24,01	1,37
12. Korea Selatan	802,5	770,1	-32,4	-4,04	5.609,5	7.956,5	41,84	3,63
13. Taiwan	512,9	602,9	90,0	17,54	3.726,4	6.361,2	70,71	2,90
Total 13 Negara Tujuan	15.786,2	15.544,7	-241,5	-1,53	110.681,2	158.969,9	43,63	72,50
Lainnya	5.725,8	5.739,7	13,9	0,24	44.259,5	60.295,3	36,23	27,50
Total Ekspor Non-migas	21.512,0	21.284,4	-227,6	-1,06	154.940,7	219.265,2	41,52	100,00

Tabel 1.3 Negara Tujuan Ekspor Migas dan Non Migas 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik

⁹ Berita Resmi Statistik, No. 05/01/Th. XXV, 17 Januari 2022.

¹⁰ *Ibid.*

Ekspor nonmigas Indonesia pada Desember 2021 ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang masing-masing mencapai US\$5.101,0 juta; US\$2.640,6 juta; dan US\$1.695,1 juta. Nilai ekspor ke beberapa negara tujuan dapat dilihat pada Tabel 3. Total nilai ekspor nonmigas Desember 2021 ke 13 negara tujuan mencapai US\$15.544,7 juta atau turun US\$241,5 juta (1,53 persen) dibanding November 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya nilai ekspor ke sebagian besar negara tujuan utama seperti Tiongkok US\$310,4 juta (5,74 persen), Malaysia US\$224,1 juta (18,74 persen), dan Italia US\$59,7 juta (19,40 persen). Beberapa negara yang mengalami peningkatan diantaranya Amerika Serikat US\$100,8 juta (3,97 persen); Thailand US\$96,4 juta (20,27 persen); serta Taiwan S\$90,0 juta (17,54 persen). Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa pada Desember 2021 mencapai US\$3.934,5 juta dan US\$1.708,2 juta, atau ke ASEAN turun 5,01 persen dan ke Uni Eropa turun 5,15 persen dibanding November 2021.¹¹

Penyatuan 16 negara dalam sebuah perjanjian perdagangan yang bebas akan membuat RCEP menjadi kekuatan baru perdagangan dunia kerja sama perdagangan bebas dalam konsep RCEP bisa dikatakan cukup besar karena mayoritas negara-negara yang tergabung dalam kerja sama ini memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar.¹² Di samping harapan akan peluang besar yang ditawarkan RCEP bagi Indonesia, terutama di sektor non-migas, terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Untuk dapat memanfaatkan RCEP secara optimal, produk-produk ekspor unggulan Indonesia

¹¹ Berita Resmi Statistik, No. 05/01/Th. XXV, 17 Januari 2022.

¹² https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership

perlu terus meningkatkan daya saing dan efisiensi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peluang dan tantangan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam bidang non-migas dapat diidentifikasi dan dikelola secara efektif bagi Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman akademis, tetapi juga rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengoptimalkan pemanfaatan RCEP demi kepentingan ekonomi nasional.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian untuk dijawab selama proses penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peluang dan tantangan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam bidang non-migas bagi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peluang dan tantangan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam bidang non-migas bagi Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan dari tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

E. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kepada pembaca serta nantinya diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian – penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Pemanfaat Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bagi Indonesia dalam bidang ekspor non migas.

F. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi instansi pemerintah yang bersangkutan guna memberikan informasi terkait ekspor non-migas dengan adanya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan bagi penulis mengenai dampak Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam bidang ekspor non migas.

G. Tinjauan Pustaka

Merujuk pada ekonomi, John Ravenhill mengatakan keterbukaan terhadap perdagangan dan kepercayaan pada pasar merupakan hal terpenting dalam kerjasama. Di bawah kerja sama ASEAN ini, pemerintah menyadari perlunya menjaga daya saing dengan melacak perkembangan hubungan perdagangan di

dalam dan di luar ASEAN, sehingga berkolaborasi lebih banyak dan memfasilitasi perubahan. saya termotivasi. Hampir segala sesuatu dalam perjanjian RCEP menguntungkan, tetapi selalu ada sesuatu di baliknya yang mengubah perjanjian yang ada atau mempengaruhi manfaat salah satu pihak yang merundingkan perjanjian kerja sama. Kerja sama ini juga bertujuan untuk membangun kerja sama ekonomi, meningkatkan kepercayaan antar anggota, serta meningkatkan hubungan politik dan diplomatik antar anggota. Menurut Keohane, kerjasama internasional yang dalam konteks ini RCEP adalah suatu kondisi atau kegiatan untuk menentukan kebijakan yang dibentuk oleh aktor-aktor internasional. Ada beberapa perubahan dalam desain kerja sama internasional, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Dengan kata lain, perubahan aktor-aktor kerjasama internasional dilakukan terutama oleh negara-negara maju yang menitikberatkan pada negosiasi di bidang ekonomi. Kohane mengatakan, kerja sama internasional tidak lepas dari berbagai kepentingan para pihak yang terlibat. Kerja sama internasional juga memiliki dua syarat: penghindaran situasi yang menghasilkan konflik, dan kondisi kerja sama internasional adalah bahwa memberikan ancaman kepada aktor lain adalah kepentingan kerja sama internasional, dan dengan demikian dapat mengarah pada situasi yang menghasilkan konflik. Ada juga seksualitas.¹³

Jagannath Panda mengatakan RCEP memiliki elemen unik dan TPP kira-kira setara dalam kerjasamanya. RCEP sendiri dapat membangun integrasi regional dan membangun hubungan yang harmonis di masa depan. Namun tidak

¹³Axelrod, Robert Robert O. Keohane. 2015. *Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions*. Cambridge University Press. *World Politics*, Vol. 38, No. 1 (Oct., 1985)

dapat dipungkiri bahwa keberadaan RCEP dapat menjadi tantangan bagi negara-negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut. Asia sedang memasuki tahap di mana liberalisasi dan integrasi dipandang sangat penting bagi pembangunan ekonomi masa depan. RCEP akan memasuki tahap di mana negosiasi harus mempertemukan kepentingan nasional, dan semua bangsa akan diberikan fasilitas dan pertaruhan yang sesuai untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, China dan India sebagai dua kekuatan besar dapat mengalami dinamika dan politik kekuatan baru di kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas, membuka peluang integrasi yang lebih besar bagi negara-negara di Asia Timur dan kawasan Asia-Pasifik¹⁴

Menurut Sanchita dan Reema, ASEAN mengambil keputusan yang bijak untuk menginisiasi kerja sama ini di bawah kesepakatan RCEP. Ini juga memberi ASEAN kesempatan untuk memainkan peran kunci dalam membangun perjanjian perdagangan bebas Asia-Pasifik dan memperluas pengaruh regionalnya. RCEP tidak hanya akan mengintegrasikan yang sudah ada, tetapi juga bertindak sebagai blok bangunan dari sistem perdagangan multilateral yang ada. Di tengah kekhawatiran bahwa kesepakatan ini tidak berbeda dengan ASEAN Plus One, ada juga beberapa masalah yang harus diselesaikan ASEAN. Meskipun demikian, RCEP dapat membawa paradigma baru dalam sistem perdagangan internasional.¹⁵

Menurut Deborah dan Minh, ASEAN berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan melalui kerja sama RCEP yang melibatkan banyak kekuatan besar. ASEAN bekerja sama tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga

¹⁴ Jaannath Panda “*India-China Relations*” page 16, 2016

¹⁵ Sanchita Basu; Jagtiani, Reema B. “*The Regional Comprehensive Economic Partnership: New Paradigm or Old Wine in a New Bootle*” November 2014

membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan negara-negara kawasan ASEAN. Sejak tahun 1996, ASEAN telah merencanakan dan mengembangkan Plus Three dengan China, Korea Selatan dan Jepang untuk bekerjasama di berbagai bidang. Dilihat dari letak geografis ASEAN sendiri, negara-negara tersebut berada di tengah-tengah negara-negara anggota CEPA, dan dinamika ini memberikan peluang bagi ASEAN untuk menawarkan lebih banyak lagi: RCEP. Penulis percaya bahwa peningkatan keanggotaan Forum RCEP untuk Kerjasama Ekonomi, dengan partisipasi negara-negara besar, akan membawa ASEAN ke tingkat integrasi yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai semacam studi banding antara negara-negara ASEAN dengan para pesaing tersebut, karena dalam RCEP para pesaing yang berpartisipasi memiliki keunggulan di bidang yang berbeda.

Dalam hal ini, sebagai bahan perbandingan penelitian, penulis akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya yaitu:

1. Ringkasan Kebijakan yang berjudul **“Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya”** yang ditulis oleh Donna Gultom pada November 2020. Ringkasan Kebijakan ini membahas tentang Penyesuaian Struktural dan arah Kebijakan yang dimana telah Mempersiapkan dan melaksanakan langkah-langkah atau penyesuaian struktural tanpa penundaan, seperti yang direkomendasikan oleh berbagai studi tentang dampak RCEP terhadap perekonomian Indonesia, agar Indonesia dapat memanfaatkan sepenuhnya

peluang RCEP di masa depan. dibutuhkan. Pemerintah akan memanfaatkan peluang RCEP-nya untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Kunci keberhasilannya adalah meningkatkan daya saing negara, yang akan mempengaruhi daya saing industri dalam negeri yang ada dan daya tarik lingkungan investasi. Saya sepenuhnya sadar memberi. industri dan revolusi industri. 4.0 Langkah ini tidak hanya sangat koheren, tetapi juga menjadi mesin upaya pemulihan ekonomi jangka panjang yang harus dilakukan secara serius, cerdas, komprehensif dan berkelanjutan. Pandemi Covid-19 miliknya ini harus menjadi titik balik bagi Indonesia karena langkah-langkah pemulihan ekonomi ke depan menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membawa Indonesia ke tingkat ekonomi yang lebih baik. Pembangunan ekonomi melalui pengembangan dan pengembangan daya saing dengan mendorong pertumbuhan sektor industri bernilai tambah dan teknologi dalam rangka revolusi Industri 4.0, perlu dijadikan prioritas secara nasional sebagai bagian dari pemulihan ekonomi. Hal tersebut sebaiknya masuk dalam kategori mendesak agar permintaan dalam dan luar negeri, khususnya dari negara-negara RCEP dan kawasan sekitarnya yang diperkirakan akan meledak pasca pandemi Covid-19, dapat terpenuhi.¹⁶ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan terletak pada detail objek penelitian. Penelitian terdahulu ini hanya fokus kepada peluang dan pemanfaatan perjanjian RCEP oleh Indonesia, sedangkan objek penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah pemanfaatan RCEP dalam bidang ekspor non-

¹⁶ Donna Gultom *Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) : Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatnya*, Ringkasan Kebijakan November 2020.

migas.

2. Menurut jurnal Mochammad Rifki Maulana yang berjudul **“Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia.”** Jurnal ini menemukan bahwa Indonesia telah memainkan peran penting dalam negosiasi di RCEP ini. Indonesia berkepentingan untuk melihat kesepakatan perdagangan ini diselesaikan. Pertama, ini akan membantu Indonesia memperluas pasarnya dan berintegrasi lebih jauh ke dalam rantai pasokan global. Kedua, RCEP hadir pada saat yang tepat sebagai pelengkap Omnibus Law yang baru saja disahkan dalam mewujudkan reformasi struktural di Indonesia. Hal ini bahkan lebih penting mengingat perkembangan multilateralisme yang lambat dan terganggunya perdagangan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto, Indonesia dapat diuntungkan dari segi ekspor dan investasi. Dengan ditandatanganinya dan akan diratifikasinya RCEP, maka perjanjian tersebut berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara peserta sebesar 8-11%. Investasi ke Indonesia juga berpotensi meningkat 18-22%. Melalui RCEP, Indonesia juga dapat menikmati spillover effect dari Perjanjian Dagang Bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang dimiliki negara anggota RCEP dengan negara-negara non-anggota. Perluasan peran Indonesia melalui rantai pasok global dari spillover effect ini berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2%. Data ekspor Indonesia ke 14 negara RCEP selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 7,35%. Pada

tahun 2019, total ekspor non migas ke kawasan RCEP mewakili 56,51% total ekspor Indonesia ke dunia, yakni senilai US\$84,4 miliar.¹⁷

3. Jurnal tentang **“RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor”** Jurnal ini ditulis oleh Edy Can dan Fithra Faisal Hastiadi. Jurnal ini menemukan bahwa Setidaknya ada tiga faktor ekonomi utama yang mendorong negara-negara ASEAN untuk menciptakan RCEP. Pertama, beberapa perjanjian perdagangan bebas ASEAN+1 saat ini tidak memberikan peluang akses pasar tingkat tinggi untuk ASEAN. Dengan demikian, kehadiran RCEP berpotensi memberikan peluang untuk memperdalam komitmen liberalisasi dalam perdagangan barang, jasa, dan aturan asal (rules of origin). Kedua, koeksistensi perjanjian perdagangan bebas ASEAN+1 sendiri menciptakan situasi dampak “mi dalam mangkok” atau yang dikenal dengan noodle bowl effect yang menghambat pemanfaatan penuh skema preferensi. Sehingga dengan adanya RCEP berpotensi meringankan dampak noodle bowl effect dalam berbagai aturan dan komitmen dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN+1 yang bukan hanya dalam rules of origin melainkan juga dalam aturan lainnya. Ketiga, hasil simulasi ekonomi menunjukkan bahwa ASEAN akan kehilangan potensi keuntungan ekonominya jika perjanjian China-Japan-Korea (CJK) ASEAN ditandatangani tetapi RCEP tidak. Efek negatif ini berasal dari erosi preferensi yang saat ini dinikmati ASEAN dalam posisi sebagai perantara. Jika RCEP berhasil disimpulkan, di sisi lain, ASEAN dapat mengurangi dampak negatif

¹⁷ Mochamad Rifki Maulana *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) dan pengaruhnya untuk Indonesia E Journal Vol.5 No 1 (2021)*

tersebut dan semakin memperluas peluang ekonomi.¹⁸

4. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik yang berjudul **“Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi Indonesia”** Penelitian ini diterbitkan pada 30 Juni 2018. Penelitian ini membahas tentang RCEP memiliki potensi tidak hanya sebagai perdagangan barang saja namun lebih jauh dari hal itu memiliki transaksi jasa – jasa dan investasi. Kerjasama yang dibangun di RCEP ini sebagian besar beranggotakan negara negara maju yang memiliki alternative untuk mengandekan kesepakatan yang memiliki implikasi luas di berbagai sector industry dan usaha di masyarakat. Peluang jika RCEP berlaku 30 persen dari PDB dunia serta memiliki potensi pasar USD 21,6 triliun di kawasan ini. Keuntungan juga terus membanjir dalam forum RCEP bagi Indonesia kalau negara Indonesia mampu membuka akses pasar barang ekspor pada negara negara mitra serta juga dalam domestik dalam negeri Indonesia juga akan kebanjiran pasokan bahan baku yang tidak terpenuhi di industry domestik. Hal ini yang menjadi kesepakatan yang sangat penting untuk dinegosiasikan dalam forum tersebut. Upaya yang harus dilakukan dalam penyelesaian perundingan RCEP ada tiga isu penting yaitu perdagangan jasa (trade in services), investasi dan perdagangan barang (trade in goods). Selain itu transformasi struktur ekspor yang berbasis komoditi ke produk dan jasa mendorong untuk mampu bertambah serta memanfaatkan skema prefensi yang merupakan sebagai bentuk perjanjian natara lain AEC, ASEAN+1s,

¹⁸ Edy Can dan Fithra Faisal Hasriadi *RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor* Jurnal Ilmiah Vol. 11 No. 2 (2020)

IJEPA, INA-PAK FTA serta lainnya sebelum kesepakatan RCEP terwujud¹⁹.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fadhlán Taufiqurrahman yang berjudul Penelitian tersebut mengemukakan bahwasannya ASEAN salah satu organisasi internasional regional yang menaungi negara negara yang ada di Asia Tenggara cukup berperan aktif untuk meningkatkan perdagangan internasional. Peran ini secara historis bermula sejak akan digalakkannya AFTA (Asean Free Trade Area), ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area), AEC 2015 (Asean Economic Community 2015), hingga RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership merupakan bentuk reaksi ASEAN terhadap dinamika ekonomi di kawasan dan dunia berdasarkan pilar keempat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Yakni integrasi ASEAN bersama dengan negara negara mitra seperti Australia, Selandia Baru, RRT, Jepang, Republik Korea dan India bersama sama memprakarsai pembentukan RCEP. Selain itu Penting untuk diketahui bahwa Mega Free Trade Area Agreement ini berawal dari fondasi hubungan Free Trade Area yang telah dimiliki oleh ASEAN dengan masing masing negara mitra. Diantaranya ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area), ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-Australia New Zealand FTA, dan ASEAN-India FTA. Ide awal pembentukan RCEP berasal dari Indonesia, berdasarkan reaksi ASEAN untuk mempertahankan sentralitas ASEAN dalam proposal ASEAN +3 atas usulan

¹⁹ Ragimun Abdullah *Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi Indonesia* Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol.9 No.1 (2018)

Tiongkok dan proposal ASEAN +6 atas usulan Jepang.²⁰

6. Artikel yang ditulis oleh Ragimun dan Imran Rosjadi yang berjudul **“Penguatan Produk Loser Sector Menjadi Produk Unggulan Kerja Sama RCEP”** dalam artikel tersebut menemukan bahwa Dengan ditandatanganinya kerja sama RCEP maka ada beberapa persiapan dan strategi Indonesia dalam forum tersebut antara lain kerjasama akan dapat menguntungkan bagi Indonesia. Salah satu diantaranya adalah penerapan NTMs atau Non Tariff Measures. Penerapan NTMs merupakan salah satu strategi untuk menahan membanjirnya barang impor. Namun, penerapan NTMs Indonesia masih jauh dibawah dibandingkan mitra RCEP lainnya seperti China, Jepang, Australia, India, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina. Beberapa NTMs tersebut antara lain, anti-dumping (ADP), countervailing (CV), quantitative restrictions (QR), safeguards (SG), sanitary and phytosanitary (SPS), special safeguard (SSG), technical barriers to trade (TBT), tariff rate quotas (TRQ) dan export subsidies (ES).²¹
7. Jurnal yang berjudul **“Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership”** yang ditulis oleh Dedi Parna. Penelitian ini membahas tentang peluang pembentukan RCEP bagi Indonesia yang Memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada bentuk dan bentuk rantai pengiriman serta tingkat ketergantungan moneter di dalam lokasi masing-masing peserta dan lokasi internasional non-

²⁰ Taufiqurrahman Fadhlhan, Skripsi *“Pemanfaatan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam bidang E-Commerce bagi Negara Indonesia di Kawasan ASEAN* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2022)

²¹ Ragimun dan Imran Rosjadi *Penguatan Produk Loser Sector Menjadi Produk Unggulan Kerjasama RCEP Kajian 2021*

RCEP. RCEP yang merupakan konsolidasi Asean +1FTA adalah penyelesaian dengan persyaratan tinggi yang berlebihan dan memiliki keuntungan moneter timbal balik dengan menggunakan peningkatan dan pendalaman kerjasama di dalam bidang moneter terutama berdasarkan FTA yang ada dan mutakhir. RCEP juga terutama didasarkan sepenuhnya pada akses terbuka ini berarti menawarkan fleksibilitas bagi kontributor untuk mengambil bagian nanti. Implementasi RCEP akan membuka pasar mendapatkan akses yang perlu digunakan oleh Indonesia. Indonesia perlu dipersiapkan dan mampu memasuki pasar, terutama produk sintetis dan produk lainnya dengan tujuan untuk menawarkan biaya pengiriman di RCEP yang melibatkan lokasi internasional. Kesiapan perusahaan di seluruh negeri untuk menyediakan barang-barang dengan biaya pengiriman merupakan prioritas utama yang harus dilengkapi dengan bantuan penggunaan Indonesia agar manfaat RCEP paling dapat diandalkan bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Indonesia juga ingin menginspirasi masuknya dana dalam dan luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan barang yang masuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan barang yang diproduksi dan daya saing dengan tujuan untuk dapat mengambil keuntungan dari pasar saat ini masing-masing regional. dan di RCEP mengambil bagian lokasi internasional. RCEP menawarkan kenyamanan bagi para anggotanya di lokasi internasional dalam memperoleh bisnis bahan mentah secara efektif dan itu cukup menjanjikan bagi Indonesia.²²

²² Dedi Parna *Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership* Jurnal 2020

8. Skripsi yang ditulis oleh Andiasta Alfebuci Wicaksono yang berjudul **“Penggagasan Negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Oleh ASEAN”** ini ditulis pada tanggal 25 Agustus 2020. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Ada tiga motivasi non-ekonomi yang digunakan untuk melakukan analisis dalam kerjasama RCEP ini. Yang pertama adalah keinginan ASEAN untuk mempertahankan pasar yang ada dan keinginannya untuk mengakses pasar yang berpotensi memberikan manfaat besar bagi ASEAN, dua motivasi defensif utama yang terkait. Pasar ASEAN sudah cukup besar dengan China, Amerika Serikat dan Uni Eropa di antara 10 negara teratas yang aktif mengimpor dan mengekspor dari ASEAN. ASEAN sebenarnya telah menandatangani perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru sebelum RCEP didirikan, tetapi akan lebih mengembangkan pasarnya dan mempertahankan pasar yang ada. Kerjasama RCEP ini terjalin karena negara-negara peserta RCEP memiliki kekuatan militer yang relatif besar dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN-nya, maka motif pertahanan tidak dapat dipisahkan dari kekuatan nasional. juga penting. Yang kedua adalah motivasi politik, dengan ASEAN memainkan peran penting dalam politik regional. Misalnya membuka diri terhadap persaingan asing, baik dalam tarif maupun bidang barang dan jasa lainnya. Mayoritas negara ASEAN berkembang dengan baik, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi, dan ASEAN berupaya menarik perhatian negara dan investor lain serta membuktikan bahwa ia menawarkan produk dan layanan yang berkualitas.

Terakhir, yang ketiga adalah motivasi strategis ASEAN untuk membangun perekonomian. Dengan adanya RCEP ini diharapkan dapat meningkatkan performa perekonomian dari ASEAN sendiri dengan luasnya pasar dan negara negara yang akan membantu menunjang perekonomiannya. ASEAN merasa penting untuk membuka diri dengan melakukan perjanjian tersebut karena ASEAN sendiri memiliki banyak bahan baku mentah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang perekonomiannya dengan membangun negara negara yang ada di dalamnya.²³

9. Artikel yang ditulis oleh Muwalliha Syahdani yang berjudul **“Regionalisme Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Sebuah Perspektif**. Artikel ini menemukan bahwa Sebagai perjanjian perdagangan, RCEP menyatukan negara negara terlibat ke dalam bentuk regionalisme atau pembagian negara berdasarkan kawasan tertentu. Regionalisme RCEP menjadi satu integrasi ekonomi secara nyata yang dibentuk sesuai dengan pemikiran regionalisme baru. Pembentukan RCEP sebagai efek dari globalisasi yang semakin meningkat dan ketidakjelasan tentang kapasitas institusi multilateral khususnya PBB menjadi pemicu negara negara membentuk integrasi ekonomi dalam bentuk yang lebih baru yang dikenal Free Trade Area (FTA). Integrasi ekonomi sendiri adalah pengaturan yang dirancang untuk memfasilitasi arus barang dan jasa yang bebas di wilayah geografis yang sama. Dalam konteks ini, para aktor yang terlibat dalam penyusunan integrasi ekonomi regional memiliki kesadaran untuk secara terbuka bersaing dengan aktor ekonomi

²³ Andiasta Alfebuci Wicaksono, Skripsi “*Penggunaan Negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Oleh ASEAN* (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia)

lainnya yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan integrasi global. Regionalisme yang dibawa RCEP merupakan hasil negosiasi para aktor dalam institusi atau sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah demi mendorong integrasi ekonomi regional dalam konteks ini adalah ASEAN.²⁴

10. Jurnal yang ditulis Randy Aulia Isan yang berjudul **“Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)”**. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa China merupakan salah satu aktor yang bertujuan mencari keuntungan dalam pembentukan RCEP, salah satunya adalah untuk memperbaiki situasi politik dan ekonomi di kawasan Asia Timur. China membuat RCEP sebagai forum untuk menjembatani dan menyelesaikan sengketa di Asia Timur. Terbentuknya kerjasama antara negara-negara Asia Timur dalam RCEP akan memfasilitasi perubahan yang lebih baik dalam situasi politik dan ekonomi yang terjadi di Asia Timur. Salah satu konflik yang paling mencolok saat ini adalah memanasnya hubungan antara China dan Jepang. Mengingat kawasan Asia Timur merupakan kawasan geopolitik dan geopolitik yang sangat berpengaruh, kedua negara harus segera meningkatkan hubungan untuk menjamin keamanan, stabilitas dan kemakmuran di Asia Timur. . Setelah kedua negara bertemu pada saat perundingan RCEP, kedua negara kembali bertemu pada pertemuan puncak trilateral China, Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2015 untuk lebih meningkatkan hubungan dan memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Ketika kami sepakat, hasilnya menjadi jelas.

²⁴ Muwaliha Syahdani *Regionalisme Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) : Sebuah Perspektif* Article Vol. 1 No. 1 2021

Kedua belah pihak sepakat tentang pentingnya mempromosikan dan meningkatkan hubungan bilateral dan berharap untuk mempromosikan perdagangan yang lebih dekat, pertukaran ekonomi, budaya, budaya dan unifikasi.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Dalam Bidang Non Migas Bagi Indonesia” akan dibagi menjadi lima bagian. Hal ini bertujuan agar memudahkan untuk memahami setiap penjelasan dalam penelitian ini. Adapun lima bagian ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari beberapa bagian, pertama merupakan latar belakang masalah yang diteliti mengenai peluang pemanfaatan perjanjian RCEP dalam bidang ekspor non migas serta peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi Indonesia sehingga dapat membentuk sebuah fokus penelitian. Kemudian setelah menjelaskan permasalahan pada penelitian ini, peneliti menjelaskan terkait tujuan penelitian yang dilakukan serta manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis. Kemudian penulis juga menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian. Terakhir bab ini membahas tentang argumentasi utama penulis sebagai dugaan sementara mengenai penelitian yang dilakukan.

Bab II : Landasan Teoritik

²⁵ Randy Aulia Isan *Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* JOM Fisip Vol. 4 No. 1 Februari 2017

Pada bab 2 ini membahas mengenai teori dasar yang mendasari analisis topik penelitian untuk mengidentifikasi masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Neoliberalisme dan konsep Kepentingan Nasional.

Bab III : Metode Penelitian

Kemudian pada bab ini, membahas mengenai metode penelitian, yang berisi langkah-langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik pembahasan yang digunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini, yang terdiri dari; jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, subjek dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

Bab IV : Penyajian dan Analisis Data

Dalam bab ini penulis menyajikan data-data yang telah didapatkan penulis mengenai topik bahasan. Data yang digunakan peneliti berupa data-data primer dan sekunder. Kemudian penulis akan menyajikan mengenai hasil penelitian yang berfokus pada pemanfaatan perjanjian RCEP bagi Indonesia dalam bidang ekspor. Pada bab ini penulis juga melakukan analisa data agar dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dari hasil yang sudah didapatkan selama penelitian berlangsung. Kemudian di bab ini juga diberikan saran kepada beberapa pihak terkait, serta berbagai penelitian di waktu yang akan datang.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian, kerangka konseptual memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar pemikiran dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Kerangka ini berfungsi sebagai peta teoritik yang membantu peneliti dalam memahami, menjelaskan, serta menginterpretasikan fenomena yang ditemukan di lapangan. Dengan adanya kerangka konseptual, peneliti dapat mengarahkan fokus analisis secara lebih sistematis dan logis terhadap variabel-variabel yang relevan dalam penelitian. Pada penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan adalah konsep *Free Trade Agreement* (FTA), yang menjadi fondasi dari terbentuknya perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP merupakan salah satu bentuk perjanjian perdagangan bebas multilateral terbesar yang berlaku di kawasan Asia-Pasifik, termasuk ASEAN dan Indonesia sebagai anggotanya. Konsep FTA dipilih karena secara langsung berkaitan dengan tujuan utama RCEP, yakni menghapus hambatan perdagangan, memperluas akses pasar, dan memperkuat integrasi ekonomi di kawasan.

Hubungan antara konsep dan temuan lapangan dalam penelitian ini terletak pada bagaimana pemahaman terhadap prinsip-prinsip FTA dapat digunakan untuk menganalisis kesiapan dan potensi Indonesia dalam memanfaatkan RCEP, khususnya pada sektor non-migas. Konsep FTA memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi aspek-aspek seperti penghapusan tarif, peningkatan ekspor, daya saing produk nasional, serta reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks perdagangan regional.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini tidak hanya memberikan dasar teoretis, tetapi juga berfungsi sebagai alat analisis yang membantu dalam membaca fenomena yang muncul dari data lapangan. Analisis yang dibangun berdasarkan kerangka ini akan diarahkan untuk melihat sejauh mana Indonesia mampu mengoptimalkan manfaat dari RCEP, serta tantangan-tantangan struktural dan kebijakan yang harus dihadapi.

A. Free Trade Agreement (FTA)

Free Trade Agreement (FTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas adalah bentuk kerja sama perdagangan antar dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan, baik yang bersifat tarif (tarif impor, bea masuk) maupun non-tarif (kuota, lisensi ekspor-impor, peraturan teknis), demi memperlancar arus barang dan jasa di antara negara-negara anggota. FTA umumnya tidak mencakup tarif eksternal bersama, berbeda dengan serikat pabean, sehingga setiap negara anggota FTA masih memiliki keleluasaan dalam menentukan tarif perdagangan mereka terhadap negara non-anggota. Menurut O'Sullivan dan Sheffrin dalam *Economics: Principles in Action*, FTA adalah “*a pact between two or more nations to reduce barriers to imports and exports among them*” yang menekankan pada aspek liberalisasi ekonomi dan keterbukaan pasar sebagai alat utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan regional melalui mekanisme perdagangan

bebas²⁶. Sementara itu, Bhagwati dalam bukunya *Free Trade Today* menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas adalah sarana untuk memperkenalkan efisiensi ekonomi dengan menghilangkan distorsi pasar akibat perlindungan proteksionis, dan mendorong negara untuk memproduksi berdasarkan keunggulan komparatif mereka²⁷. Karakteristik utama dari FTA meliputi:

1. Penghapusan Hambatan Perdagangan: Negara-negara anggota FTA sepakat untuk mengurangi atau menghapus tarif dan hambatan non-tarif guna menciptakan akses pasar yang lebih luas dan kompetitif.
2. Kedaulatan Tarif Eksternal: Berbeda dengan serikat pabean, FTA tidak memaksakan tarif bersama terhadap negara non-anggota. Setiap negara bebas menentukan kebijakan tarif mereka terhadap pihak ketiga.
3. Keterbukaan Pasar secara Selektif: FTA bersifat eksklusif terhadap negara anggota, sehingga memberikan keuntungan kompetitif dalam perdagangan intra-FTA dibanding negara di luar perjanjian.
4. Koordinasi Standar Teknis dan Regulasi: FTA mendorong harmonisasi kebijakan teknis dan regulasi mutu guna mengurangi friksi dalam perdagangan lintas negara.
5. Fleksibilitas Implementasi: FTA sering kali memberikan masa transisi dan fleksibilitas kepada negara-negara berkembang atau kurang berkembang dalam implementasinya.

²⁶ O'Sullivan, A., & Sheffrin, S. M. (2006). *Economics: Principles in Action*. Pearson Prentice Hall.

<https://archive.org/details/economicsprincip00osul>

²⁷ Bhagwati, J. (2002). *Free Trade Today*. Princeton University Press.

<https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691092717/free-trade-today>

FTA dirancang dengan tujuan strategis untuk:

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi melalui spesialisasi: Dengan mengurangi hambatan perdagangan, negara dapat lebih fokus memproduksi barang atau jasa yang mereka miliki keunggulan komparatif, yang akan mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih optimal²⁸.
2. Mendorong integrasi ekonomi regional: FTA berperan sebagai alat diplomasi ekonomi untuk memperkuat kerja sama regional dan memperluas jaringan produksi global²⁹.
3. Meningkatkan akses pasar internasional: Dengan dihapuskannya hambatan, pelaku usaha nasional memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar luar negeri.

Menurut Plummer, dampak dari FTA dibagi ke dalam dua kategori besar: efek statis dan efek dinamis³⁰.

1. Efek Statis (Jangka Pendek)

- *Trade Creation (Penciptaan Perdagangan)*: Terjadi ketika barang-barang yang sebelumnya diproduksi domestik digantikan oleh barang impor dari negara anggota FTA dengan harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi.
- *Trade Diversion (Pengalihan Perdagangan)*: Terjadi ketika impor dialihkan dari negara non-FTA (yang mungkin lebih efisien) ke negara

²⁸ Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). *International Economics: Theory and Policy* (8th ed.). Pearson Education.

<https://archive.org/details/internationaleconomictheorykrugman>

²⁹ Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.

<https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674660489>

³⁰ Plummer, M. G. (2006). *The ASEAN Economic Community and the European Experience*. *Asian Economic Policy Review*, 1(2), 266–284.

<https://doi.org/10.1111/j.1832-7610.2006.tb00022.x>

anggota FTA karena keuntungan tarif preferensial, meskipun tidak selalu efisien secara ekonomi.

2. Efek Dinamis (Jangka Panjang)

- Skala Ekonomi: Melalui akses ke pasar yang lebih luas, perusahaan-perusahaan domestik dapat memproduksi dalam skala besar yang menurunkan biaya per unit.
- Transfer Teknologi dan Penanaman Modal Asing (FDI): FTA meningkatkan daya tarik investasi dengan mengurangi risiko perdagangan lintas batas dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor asing.
- Reformasi Kebijakan Ekonomi: Negara anggota cenderung melakukan harmonisasi kebijakan seperti regulasi ekspor-impor, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan investor untuk menyesuaikan dengan standar internasional.
- Peningkatan Daya Saing: Dengan masuknya produk asing, industri dalam negeri terdorong untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi agar dapat bersaing di pasar terbuka.

Dampak positif dari FTA juga terlihat dalam peningkatan indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekspor, produktivitas industri, dan pembukaan lapangan kerja di sektor-sektor kompetitif.

B. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu alat analisis strategis yang paling fundamental dan luas digunakan dalam studi kebijakan publik, ekonomi, hingga

hubungan internasional. SWOT adalah akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Analisis ini membantu pengambil kebijakan atau pelaku ekonomi untuk mengenali faktor internal dan eksternal yang memengaruhi strategi atau kebijakan tertentu³¹. Menurut David, analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi atau negara, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal³². Dalam konteks ekonomi internasional dan perdagangan bebas, SWOT sangat berguna untuk menilai kesiapan suatu negara dalam merespons perubahan kebijakan global, termasuk integrasi ekonomi seperti RCEP.

1. *Strengths* (Kekuatan): Kekuatan merujuk pada keunggulan kompetitif internal yang dimiliki oleh suatu aktor, baik negara maupun sektor industri. Dalam konteks ekspor non-migas, kekuatan bisa mencakup keunggulan sumber daya alam, tenaga kerja yang kompetitif, kapasitas produksi, dan pengalaman ekspor sebelumnya. *Strengths* ini menjadi fondasi untuk memanfaatkan peluang eksternal secara optimal³³.
2. *Weaknesses* (Kelemahan): Kelemahan adalah keterbatasan internal yang menghambat efektivitas strategi atau kebijakan. Ini bisa berupa rendahnya infrastruktur logistik, ketertinggalan teknologi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, atau kurangnya literasi perjanjian dagang di kalangan pelaku usaha.

³¹ Gurel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006. <https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>

³² David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases* (16th ed.). Pearson.

³³ Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.

Identifikasi kelemahan penting untuk menghindari kesalahan strategi dan merancang intervensi kebijakan yang relevan³⁴.

3. *Opportunities* (Peluang): Peluang merupakan kondisi eksternal yang berpotensi memberikan keuntungan jika dimanfaatkan secara tepat. Dalam konteks RCEP, peluang dapat muncul dalam bentuk akses pasar baru, harmonisasi aturan perdagangan, peningkatan investasi asing langsung (FDI), serta integrasi rantai nilai kawasan (*regional value chains*)³⁵. Peluang ini hanya dapat diambil bila negara atau sektor industri memiliki kapasitas internal yang mendukung.
4. *Threats* (Ancaman): Ancaman merupakan faktor eksternal yang berpotensi merugikan atau menghambat pencapaian tujuan suatu negara, organisasi, atau perusahaan. Ancaman mencakup kondisi eksternal yang dapat mengganggu stabilitas atau keberhasilan strategi yang dijalankan. Dalam perdagangan bebas, ancaman dapat berupa persaingan dari negara lain dengan efisiensi produksi lebih tinggi, ketidakstabilan politik dan ekonomi global, serta potensi ketergantungan pada mitra dagang tertentu. Analisis terhadap threat penting untuk mendorong kesiapsiagaan dan ketahanan sektor ekspor nasional³⁶.

Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan sebagai kerangka berpikir untuk memahami kesiapan dan posisi strategis Indonesia dalam memanfaatkan RCEP di bidang ekspor non-migas. Dengan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang relevan, peneliti dapat menyusun gambaran yang menyeluruh dan sistematis terkait kondisi faktual Indonesia sebelum implementasi penuh RCEP

³⁴ Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy* (13th ed.). Pearson Education.

³⁵ ASEAN Secretariat. (2020). *RCEP Overview and Framework*. <https://asean.org>

³⁶ Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2020). *East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia's New Trade Blocs*. Peterson Institute. <https://piie.com>

(hingga Januari 2022). Pendekatan SWOT juga berguna untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang berbasis pada data dan pertimbangan empiris.

C. Pemanfaatan Perjanjian RCEP dalam Sektor Non-Migas

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas multilateral terbesar di dunia yang secara resmi diinisiasi oleh ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 di Phnom Penh, Kamboja, pada November 2012. Perjanjian ini bertujuan untuk menyatukan berbagai skema Free Trade Agreement (FTA) yang telah eksis antara ASEAN dan lima mitra dagangnya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru), menjadi satu kerangka integratif yang lebih sederhana dan terstruktur. RCEP mulai berlaku pada 1 Januari 2022 setelah memenuhi ambang batas ratifikasi oleh enam negara ASEAN dan tiga negara mitra FTA ASEAN, sebagaimana diatur dalam Pasal 20.6 Bab XX: Entry into Force³⁷. RCEP merupakan respons terhadap dinamika globalisasi dan regionalisasi ekonomi, serta upaya negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk meningkatkan integrasi ekonomi secara menyeluruh melalui penghapusan hambatan perdagangan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif³⁸. Setelah diratifikasi oleh minimal enam negara ASEAN dan tiga mitra FTA ASEAN, seperti yang dipersyaratkan dalam ketentuan implementasinya. RCEP lahir dari dorongan ASEAN untuk membentuk kerangka kerja sama ekonomi regional yang inklusif, yang menyatukan lima

³⁷ ASEAN Secretariat. (2020). *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement – Final Text*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Final-RCEP-Text-2020.pdf>

³⁸ ASEAN Secretariat. (2012). *Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Final-RCEP-Text-2020.pdf>

perjanjian FTA ASEAN yang telah ada sebelumnya, yaitu dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Selain sebagai strategi penguatan posisi ASEAN dalam arsitektur ekonomi kawasan, RCEP juga menjadi tandingan terhadap inisiatif perdagangan lain seperti Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)³⁹.

Ruang lingkup RCEP sangat luas, meliputi liberalisasi perdagangan barang dan jasa, fasilitasi investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, e-commerce, persaingan usaha, kerja sama usaha kecil dan menengah (UKM), serta penyelesaian sengketa perdagangan. RCEP berusaha menciptakan kerangka kerja yang menyederhanakan aturan asal barang (*rules of origin*), harmonisasi tarif, serta pengurangan hambatan non-tarif untuk mempermudah rantai pasok regional⁴⁰. RCEP terdiri atas 15 negara anggota, yakni:

- 10 negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.
- 5 mitra FTA ASEAN: Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Dengan keanggotaan yang mencakup sekitar 30% PDB dunia dan 2,3 miliar penduduk, RCEP membentuk blok ekonomi terbesar secara global, melampaui Uni Eropa maupun Perjanjian ASMCA (Amerika Serikat, Meksiko, Kanada)⁴¹.

³⁹ Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2020). *East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia's New Trade Blocs*. Peterson Institute for International Economics. <https://www.piie.com/publications/working-papers/east-asia-decouples-united-states>

⁴⁰ Wignaraja, G. (2021). *RCEP and the Future of Asian Trade*. *Global Asia*, 16(1), 30–35. <https://www.globalasia.org/v16no1/cover/rcep-and-the-future-of-asian-trade-ganeshan-wignaraja>

⁴¹ UNCTAD. (2021). *RCEP: A New Trade Agreement That Will Shape Global Economics*. <https://unctad.org/news/rcep-new-trade-agreement-will-shape-global-economics>

Keunggulan mendasar dari RCEP sebagai instrumen hukum multilateral terletak pada kemampuannya menyederhanakan dan menyeragamkan ketentuan *Rules of Origin* (RoO), memberikan preferensi tarif secara kolektif, dan menciptakan ekosistem regulatif yang mempermudah pelaku usaha dari negara anggota untuk melakukan ekspor lintas negara dalam blok ekonomi yang sama. Khusus bagi sektor non-migas, ketentuan ini sangat relevan karena sektor ini mencakup komoditas padat karya dan padat modal seperti tekstil, produk elektronik, karet olahan, alas kaki, dan produk pertanian olahan yang sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok regional dan pengurangan hambatan tarif maupun non-tarif⁴². Pemanfaatan RCEP dalam sektor non-migas dapat ditinjau dari beberapa aspek utama isi perjanjian, antara lain:

1. Pasal 2.4 dan 2.5 Bab II (*Trade in Goods*) yang menetapkan pengurangan dan penghapusan tarif bea masuk secara progresif terhadap berbagai komoditas non-migas. Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini membuka peluang besar untuk peningkatan daya saing ekspor tekstil dan produk elektronik ke negara mitra RCEP yang sebelumnya menerapkan tarif tinggi⁴³.
2. Bab III (*Rules of Origin*) menekankan pembentukan satu sistem sertifikasi asal barang yang seragam (*Certificate of Origin Form RCEP*), memungkinkan perusahaan Indonesia mendapatkan status produk origin RCEP dengan fleksibilitas akumulasi asal barang antar anggota. Hal ini memudahkan pelaku

⁴² Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2020). *East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia's New Trade Blocs*. Peterson Institute for International Economics. <https://www.piie.com>

⁴³ Ministry of Trade Indonesia. (2021). *Outlook Ekspor Indonesia Pasca RCEP*. <https://www.kemendag.go.id>

industri non-migas dalam menyusun strategi sourcing bahan baku lintas negara RCEP secara efisien⁴⁴.

3. Bab VIII (*Small and Medium Enterprises*) menyediakan dukungan khusus bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengakses informasi, pelatihan, dan fasilitasi administratif dalam memanfaatkan peluang RCEP. Mengingat struktur sektor non-migas Indonesia sangat bergantung pada UMKM, klausul ini penting untuk mendorong inklusi perdagangan yang merata⁴⁵.
4. Bab XIV (*E-Commerce*) mendukung integrasi digital antarnegara anggota dalam transaksi barang dan jasa, termasuk dalam promosi, pembayaran, hingga pengiriman produk ekspor. Bagi produk-produk non-migas seperti kerajinan, pakaian jadi, dan produk makanan olahan, kemudahan e-commerce lintas batas menjadi kekuatan utama yang dapat dimaksimalkan⁴⁶.
5. Bab XV (*Competition*) dan Bab XVI (*Intellectual Property*) menjamin adanya sistem yang adil dalam perlindungan usaha dan kekayaan intelektual. Ini sangat bermanfaat bagi eksportir Indonesia dalam sektor non-migas yang menjual produk berbasis desain, merek, atau inovasi—misalnya alas kaki berbasis ergonomis atau batik dengan motif hak paten.

Dengan keanggotaannya yang mencakup sekitar 30% PDB global dan 2,3 miliar penduduk dunia, RCEP bukan hanya menjadi blok dagang yang masif secara volume, tetapi juga menawarkan *platform hukum dan struktural* yang dapat

⁴⁴ Asian Development Bank. (2021). *Rules of Origin and Regional Value Chains*. <https://www.adb.org/publications>

⁴⁵ Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Laporan Perkembangan Digitalisasi UMKM*. <https://kemenkopukm.go.id>

⁴⁶ UNCTAD. (2021). *E-Commerce and the Digital Economy under RCEP*. <https://unctad.org>

digunakan Indonesia untuk mendorong transformasi sektor non-migas agar lebih kompetitif dan terintegrasi ke dalam rantai pasok Asia Timur dan Pasifik⁴⁷.

D. Kerangka Konseptual

Konsep	Indikator	Sub-Indikator / Parameter	Sumber Data / Teknik Pengumpulan
Free Trade Agreement (FTA)	1. Penghapusan hambatan tarif	- Produk non-migas yang mendapatkan tarif 0% - Perbandingan tarif sebelum dan sesudah RCEP	Dokumen perjanjian RCEP; Studi pustaka
	2. Harmonisasi kebijakan perdagangan	- Keselarasan regulasi ekspor Indonesia dengan standar negara ASEAN RCEP - Adanya mekanisme mutual recognition agreement (MRA)	Studi pustaka; Wawancara dengan Kemenlu
Pemanfaatan Perjanjian RCEP dalam Sektor Non-Migas	1. Aturan asal barang (rules of origin)	- Tingkat pemahaman pelaku ekspor terhadap prosedur asal barang RCEP - Ketersediaan fasilitas COO (Certificate of Origin)	Wawancara (Erwin Akbar); Dokumen RCEP
	2. Preferensi tarif untuk produk non-migas	- Komparasi tarif ekspor produk Indonesia di negara mitra (misal: Jepang, Korsel, Tiongkok)	Data Kementerian Perdagangan; Studi pustaka
	3. Integrasi rantai pasok	- Sektor non-migas yang terlibat dalam regional value chains RCEP - Keterlibatan Indonesia dalam sistem suplai kawasan	Laporan ASEAN; BPS; Studi pustaka

⁴⁷ Wignaraja, G. (2021). *RCEP and the Future of Asian Trade*. *Global Asia*, 16(1), 30–35.
<https://www.globalasia.org/v16no1>

Konsep	Indikator	Sub-Indikator / Parameter	Sumber Data / Teknik Pengumpulan
Pemanfaatan oleh Indonesia	1. Pertumbuhan ekspor non-migas	- Nilai ekspor sektor non-migas Indonesia ke negara ASEAN RCEP (2020–2024) - Tren ekspor selama dan pasca implementasi RCEP	Data BPS; Kemendag
	2. Daya saing produk	- Kualitas produk ekspor (SNI, ISO, HACCP) - Biaya logistik dan efisiensi distribusi	Wawancara; Studi pustaka; World Bank Logistics Index
	3. Daya tarik investasi	- Realisasi FDI di sektor manufaktur non-migas - Sektor yang mengalami lonjakan investasi karena akses pasar baru	Data BKPM; Laporan RCEP
Peluang & Tantangan	1. Peluang pasar ekspor	- Produk potensial yang tumbuh di bawah rezim RCEP (contoh: tekstil, furnitur, karet, sawit olahan)	Laporan LPEM UI; Wawancara Kemenlu
	2. Tantangan kesiapan industri	- Masalah yang dihadapi pelaku usaha (sertifikasi, COO, informasi teknis) - Tingkat literasi pelaku UMKM terhadap FTA	Wawancara langsung; Hasil riset Bappenas
	3. Infrastruktur dan hambatan logistic	- Biaya pengiriman barang - Kualitas pelabuhan, jalan, dan fasilitas ekspor lainnya	Studi pustaka; Data World Bank; Wawancara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yang berjudul “Peluang dan Tantangan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Dalam Bidang Non Migas Bagi Indonesia” penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati.”⁴⁸ Adapun pengertian penelitian menurut Denzin Norman K dan Yvonna S Linlocn adalah penelitian yang disajikan dalam bentuk teks. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka sebagai data penunjang dari jurnal, buku, media nasional dan internasional serta website. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan sumber data utama yaitu dokumen resmi pemerintah berupa naskah Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership, serta melalui wawancara atau wawancara mendalam.

Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang kompleks, seperti peluang dan tantangan RCEP bagi Indonesia. Pendekatan ini relevan untuk memahami konteks, proses, dan interpretasi di balik data yang ada, yang sulit diukur secara numerik, sebagaimana terlihat dari pembahasan mengenai strategi pemerintah dan tantangan pada bab selanjutnya.

⁴⁸ Boghan&Taylor, dalam J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Karya,1975) 20

Adapun jenis teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis yaitu dengan menganalisa variabel-variabel yang telah terkumpul yaitu peluang dan tantangan RCEP bagi sektor non-migas Indonesia. Metode penelitian deskriptif analitis ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, bukan sekadar mencari hubungan kausal atau memprediksi. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan dan kaitannya dengan kerangka pikiran dalam penelitian ini, akan menggunakan teknik deduktif, yaitu memulai dari teori dan konsep umum (FTA, RCEP, peluang, tantangan) untuk kemudian diterapkan dan dianalisis dalam kasus spesifik Indonesia, serta ditarik kesimpulan di akhir. Ini sejalan dengan bagaimana pada bab selanjutnya mengawali dengan penjelasan RCEP sebagai FTA multilateral sebelum masuk ke analisis peluang dan tantangan spesifik. Metode penelitian deksriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak pula menguji hipotesis atau membuat prediksi. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan dan kaitannya dengan kerangka pikiran dalam penelitian ini, akan menggunakan teknik deduktif yaitu memaparkan dan menjabarkan masalah terlebih dahulu baru ditarik kesimpulan di akhir. Hambatan yang mungkin ditemui oleh peneliti adalah potensi kesulitan dalam memperoleh akses langsung ke subjek penelitian karena terdapat fenomena COVID-19 yang sedang melanda dunia saat perencanaan. Namun, hal ini diatasi melalui pelaksanaan wawancara daring dan optimalisasi studi pustaka untuk memastikan kelengkapan data. Penelitian yang berjudul *Peluang dan Tantangan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Dalam Bidang Non Migas Bagi Indonesia* digunakan metode observasi dan wawancara

untuk mendapatkan hasil penelitiannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership dalam Ekspor Non Migas bagi Indonesia” yang sedang dilakukan oleh peneliti menggunakan studi pustaka oleh sebab itu penelitian berlokasi di perpustakaan. Peneliti juga ingin melengkapi data primer dengan melakukan wawancara via zoom pada tanggal 24 November 2022 bersama Bapak Erwin Muhammad Akbar selaku Ministry of Foreign Affair of the Republic Indonesia.

C. Tingkat Analisa

Menurut Rourke “level analisis negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor seperti birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Tingkat analisis negara akan menghasilkan penjelasan yang tidak terlalu makro seperti yang dihasilkan pada tingkat analisis level analisis individu.”⁴⁹ Dalam studi kebijakan luar negeri terdapat tiga level tingkat analisis yaitu individu, negara dan sistem internasional. Dalam tingkat analisis Individu berfokus pada pemimpin dan pengambil kebijakan, titik fokus pada tingkat analisis Individu ialah kepribadian atau persepsi mereka. Kemudian tingkat analisis Negara berfokus pada faktor – faktor internal negara yang melibatkan dirinya dalam perilaku kebijakan luar negeri tersebut. Dan yang terakhir tingkat analisis sistem internasional yang berfokus pada interaksi antar keadaan, titik fokus pada

⁴⁹ John T, Rourke, *International Politics on the World Stage*, 5th ed., (Connecticut: Duhsking Publishing Group, 1995).

tingkat analisis ini kekuatan dan kekayaan. Sehingga, peneliti menggunakan pedoman analisis yang menggunakan tingkat analisis level negara. Sebab, penelitian ini mengkaji bagaimana Negara Indonesia mampu untuk memanfaatkan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership dalam ekspor non migas.

D. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian kualitatif meliputi langkah langkah berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini peneliti akan melakukan penelitian yang berangkat dari permasalahan yang sedang berlangsung kemudian peneliti juga memilih lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai sumber data. Dalam penentuan lokasi penelitian, peneliti juga didasarkan pada rekomendasi – rekomendasi dari pihak yang terkait. Setelah menentukan lokasi penelitian barulah peneliti mengurus perihal perizinan untuk kelancaran kegiatan penelitian untuk mencari sumber-sumber primer untuk disusun dalam proposal.

2. Tahap Lapangan

Dalam tahap ini peneliti harus memahami persoalan – persoalan yang terjadi untuk terpenuhnya informasi yang di butuhkan. Selain itu peneliti juga harus aktif dalam kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari proses secara utuh untuk menemukan hasil yang akurat. Peneliti juga harus mempersiapkan diri dikarenakan peneliti merupakan instrumen utama dalam penggalian dan pengolahan data.

3. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara survei, observasi dan wawancara mendalam. Setelah melakukan hal tersebut peneliti memilah serta memilih untuk penyeleksian data agar mudah dianalisis.

4. Tahap Laporan

Tahap ini merupakan tahapan terakhir, dimana peneliti akan menuliskan kembali hasil penelitian di lapangan dalam bentuk laporan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti sebagai bagian dari instrumen untuk mendapatkan data dan informasi di lapangan melalui observasi partisipasi maupun wawancara terbuka. Data data yang diambil oleh peneliti adalah data yang memiliki keterkaitan dalam hal Pemanfaatan Perjanjian Regional Comprehensive dalam meningkatkan Ekspor non Migas bagi Indonesia. Dalam penelitian ini juga kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Lazimnya pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi serta wawancara. Namun juga peneliti bisa mengumpulkan data melalui studi pustaka yang nantinya akan diarahkan kepada pencarian data melalui dokumen–dokumen baik tertulis maupun foto. Dari hasil tersebut penelitian akan menjadi semakin kredibel apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik. Untuk mendapatkan data sekunder , peneliti umumnya memiliki data berupa bukti, catatan atau laporan yang tersusun dengan baik. Sedangkan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung, peneliti melakukan wawancara kepada Kementerian Luar Negeri Erwin Muhammad Akbar selaku Diplomat. Sehingga, melalui teknik

tersebut akan membantu peneliti untuk mendapatkan data–data yang valid dan bisa menjawab pertanyaan penelitian.

E. Tahap Pengolahan Data

1. Reduksi Data: Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, peneliti harus jeli dalam proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data. Data yang sudah diperoleh disusun dalam bentuk laporan secara terperinci dan disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, serta dipilih hal-hal yang penting.
2. Display Data: Kemudian langkah penting dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut Miles & Huberman penyajian data kualitatif pada masa lalu merupakan sebuah bentuk teks naratif. Pada penelitian ini juga peneliti harus melakukan penyajian data dalam bentuk teks narasi.⁵⁰
3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi: Dalam tahap ini, menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data data yang sudah diproses merupakan sebuah langkah selanjutnya dari kegiatan kegiatan sebelumnya. Mentransfer data yang sudah diproses kedalam bentuk yang sesuai dengan pola pemecaha permasalahan yang dilakukan.
4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data: Teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan sebuah unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Teknik ini meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan

⁵⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative data analysis: an expanded*, Second Edition (London: Sage Publication, 1994), 12.

ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan refrensi atau mengadakan member check), transferabilitas , dependabilitas, maupun konfirmabilitas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, yang kemudian dianalisis berdasarkan kerangka konseptual tentang Free Trade Agreement (FTA) dan implementasinya dalam RCEP. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah pemanfaatan RCEP oleh Indonesia dalam sektor non-migas, dengan menekankan pada peluang, tantangan, dan dampaknya terhadap ekspor Indonesia di kawasan ASEAN. Pembahasan dalam bab ini disusun secara sistematis untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip FTA diterapkan dalam perjanjian RCEP serta bagaimana Indonesia memanfaatkannya untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk, dan menarik investasi di sektor non-migas. Selain itu, bab ini juga menguraikan keterkaitan antara peran Indonesia di ASEAN, strategi nasional perdagangan bebas, serta realisasi dan dinamika perdagangan non-migas pasca ratifikasi RCEP.

Struktur penyajian bab ini akan mengikuti indikator operasional yang telah dirumuskan dalam kerangka konseptual, yaitu (1) *Free Trade Agreement* (FTA); (2) RCEP sebagai FTA multilateral; (3) Pemanfaatan RCEP oleh Indonesia; dan (4) Peluang dan tantangan dalam ekspor non-migas. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap bagaimana konsep dan kebijakan perdagangan bebas diimplementasikan secara nyata dalam strategi ekonomi Indonesia melalui perjanjian RCEP. Dengan demikian, bab ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, tetapi juga

mengevaluasi efektivitas kebijakan perdagangan Indonesia di tengah dinamika regional yang semakin kompetitif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan yang relevan dalam konteks pemanfaatan perjanjian dagang multilateral bagi kepentingan ekonomi nasional.

A. RCEP sebagai FTA Multilateral

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan perjanjian perdagangan bebas multilateral terbesar di dunia yang lahir dari inisiatif ASEAN guna memperkuat integrasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik. Sejarah pembentukan RCEP bermula pada tahun 2012, ketika para pemimpin ASEAN dan mitra dagangnya — Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru — menyepakati kerangka kerja negosiasi dalam KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja⁵¹. Tujuan utama dari pembentukan RCEP adalah menyatukan berbagai perjanjian FTA bilateral ASEAN+1 menjadi satu kerangka kerja yang komprehensif, menyederhanakan prosedur, dan memperkuat integrasi regional melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif serta peningkatan konektivitas antarnegara. Proses negosiasi RCEP berlangsung selama hampir satu dekade dan melewati berbagai tantangan, termasuk perbedaan kepentingan antarnegara anggota serta keluarnya India dari proses negosiasi pada tahun 2019

⁵¹ ASEAN Secretariat. "Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership." 2012.
<https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Guiding-Principles-and-Objectives-for-Negotiating-the-RCEP.pdf>

karena kekhawatiran terhadap lonjakan impor, khususnya dari Tiongkok⁵². Setelah 31 putaran perundingan dan sejumlah pertemuan tingkat menteri, RCEP akhirnya ditandatangani pada 15 November 2020 secara virtual di tengah pandemi COVID-19, dan resmi mulai berlaku pada 1 Januari 2022 setelah diratifikasi oleh minimal enam negara ASEAN dan tiga mitra FTA⁵³.

RCEP mencakup lima area utama dalam liberalisasi ekonomi, yaitu: (1) perdagangan barang, dengan komitmen penghapusan tarif untuk setidaknya 92% pos tarif secara bertahap; (2) perdagangan jasa, termasuk jasa keuangan dan telekomunikasi, dengan standar minimum liberalisasi; (3) investasi, melalui perlindungan dan fasilitasi arus modal asing; (4) e-commerce, termasuk perlindungan data pribadi dan transaksi digital lintas batas; serta (5) dukungan terhadap UMKM dan kerangka kerja kompetisi usaha yang adil⁵⁴. Cakupan ini menunjukkan bahwa RCEP tidak hanya berfokus pada perdagangan tradisional, tetapi juga berusaha mengakomodasi dinamika baru dalam ekonomi digital dan inklusivitas pembangunan ekonomi kawasan. RCEP diikuti oleh 15 negara, yakni sepuluh negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar) bersama lima mitra utama: Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Secara kolektif, negara-negara anggota RCEP mencakup sekitar 30% populasi dunia,

⁵² Ministry of Commerce and Industry, Government of India. "India's Rationale for Not Joining RCEP." 2019.

<https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1592520>

⁵³ RCEP Secretariat. "Overview of RCEP Agreement." 2021.

<https://rcepsec.org/legal-text/>

⁵⁴ Asian Development Bank. "RCEP and the Future of Regional Supply Chains." ADB Briefs No. 152, 2021.

<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/662481/adb-brief-152-rcep-future-regional-supply-chains.pdf>

30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, dan sekitar 28% dari total perdagangan dunia, menjadikannya sebagai kawasan perdagangan terbesar dalam sejarah ekonomi dunia⁵⁵ Salah satu aspek teknis penting dalam implementasi RCEP adalah penerapan prinsip *Rules of Origin* (RoO), yaitu ketentuan yang menentukan asal barang untuk memperoleh fasilitas preferensi tarif. RCEP menyederhanakan RoO dengan menggunakan pendekatan *regional cumulative rules*, yang memungkinkan komponen dari berbagai negara anggota dihitung bersama sebagai “berasal dari kawasan”. Hal ini memberikan fleksibilitas dan meningkatkan integrasi rantai pasok regional, terutama bagi sektor manufaktur yang mengandalkan bahan baku lintas negara⁵⁶.

Hingga Januari 2022, implementasi awal RCEP difokuskan pada penyelarasan peraturan nasional masing-masing negara dengan ketentuan RCEP, sosialisasi kepada pelaku usaha, serta penyiapan infrastruktur kebijakan perdagangan seperti harmonisasi kode HS (*Harmonized System*) dan database preferensi tarif. Di Indonesia, sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mulai melakukan diseminasi informasi RCEP ke dunia usaha, khususnya pelaku ekspor non-migas dan sektor UMKM. Sementara itu, negara seperti Tiongkok dan Jepang secara agresif mendorong utilisasi awal dari RCEP, termasuk melalui pembentukan pusat informasi dan pemanfaatan digitalisasi

⁵⁵ WTO. “World Trade Statistical Review 2021.” Geneva: WTO, 2021.

https://www.wto.org/english/res_e/statistics_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf

⁵⁶ Kawai, Masahiro, and Ganeshan Wignaraja. *Asia's Free Trade Agreements: How is Business Responding?* Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011.

<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28429/asia-fta-business-response.pdf>

prosedur bea cukai⁵⁷. RCEP dalam tahap awal implementasinya menunjukkan potensi besar untuk memperdalam integrasi ekonomi kawasan, namun keberhasilan pemanfaatannya tetap sangat tergantung pada kesiapan domestik masing-masing negara anggota, termasuk kesiapan sektor usaha, institusi, serta sinkronisasi kebijakan nasional. Bagi Indonesia, pemanfaatan maksimal dari RCEP memerlukan pendekatan strategis yang menggabungkan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi lokal untuk berkompetisi di pasar regional. Sebagai suatu *Free Trade Agreement* (FTA) multilateral, RCEP tidak hanya mewarisi karakteristik klasik dari FTA seperti penghapusan tarif dan liberalisasi perdagangan, tetapi juga menegaskannya secara normatif dalam teks perjanjiannya.

Dalam *Preamble* RCEP, secara eksplisit dinyatakan bahwa tujuan utama perjanjian ini adalah untuk “*establish a modern, comprehensive, high-quality and mutually beneficial economic partnership agreement that facilitates the expansion of regional trade and investment.*”⁵⁸ Ini mengandung esensi utama dari FTA modern, yaitu memperluas akses pasar (market access), memperkuat integrasi regional, serta menciptakan kerangka hukum yang mendorong liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas. Salah satu dimensi paling menonjol yang mencerminkan esensi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai Free Trade Agreement (FTA) multilateral terdapat dalam Pasal 1.1 Bab I, yang secara eksplisit menyatakan bahwa “*Parties... hereby*

⁵⁷ Kementerian Perdagangan RI. “Implementasi Awal RCEP di Indonesia.” 2022. <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/news/implementasi-awal-rcep-indonesia>

⁵⁸ Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, *Preamble*, <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Final-RCEP-Text-2020.pdf>

establish the Regional Comprehensive Economic Partnership as a free trade area in accordance with the provisions of this Agreement,”⁵⁹ memperkuat legitimasi normatif RCEP sebagai zona perdagangan bebas yang sah dan terstruktur. Prinsip ini diperluas dalam Pasal 1.3, yang menekankan tujuan penghapusan hambatan tarif dan non-tarif secara progresif, liberalisasi perdagangan jasa, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, sesuai dengan karakteristik FTA modern⁶⁰.

Lebih lanjut, Pasal 2.4 Bab II secara tegas mewajibkan setiap negara anggota untuk “*reduce or eliminate its customs duties on originating goods of other Parties in accordance with its Schedule in Annex I,*”⁶¹ menegaskan upaya liberalisasi tarif barang sebagai elemen kunci FTA. Pasal 2.5 mengizinkan percepatan liberalisasi tarif melalui perundingan atau keputusan unilateral yang berlaku untuk semua anggota, mencerminkan fleksibilitas dinamis dalam struktur kesepakatan multilateral⁶². Sementara itu, Pasal 2.6 menjabarkan pengaturan *tariff differentials* dan memberikan kerangka prinsip “*preferential tariff treatment*” yang adil terhadap barang asal RCEP, sekaligus mengenalkan prinsip akumulasi nilai konten dalam penetapan asal barang (*originating status*), sehingga mendukung integrasi rantai nilai kawasan⁶³.

Tidak hanya tarif, RCEP juga menekankan aspek transparansi dan nondiskriminasi sebagai fondasi FTA modern. Pasal 2.3 mengintegrasikan ketentuan *National Treatment* GATT, menyiratkan elemen non-diskriminatif atas

⁵⁹ RCEP Agreement, Article 1.1.

⁶⁰ RCEP Agreement, Article 1.3.

⁶¹ RCEP Agreement, Article 2.4

⁶² RCEP Agreement, Article 2.5.

⁶³ RCEP Agreement, Article 2.6.

produk asing—sebuah syarat keadilan dalam perdagangan kawasan⁶⁴. Ketentuan teknis seperti Pasal 2.20 membatasi biaya dan prosedur impor-ekspor agar proporsional dan dapat diakses secara daring (online), termasuk pelarangan transaksi konsuler—langkah konkret menuju transparansi regulasi⁶⁵.

Seluruh pasal ini mencerminkan bahwa RCEP tidak sekadar menghapus tarif, tetapi juga membangun rezim perdagangan kawasan yang modern, adil, dan fleksibel. Struktur hukum dan mekanisme operasional yang disediakan oleh RCEP sesuai dengan standar FTA Multilateral abad ke-21, yang bukan hanya mengatur tarif tetapi juga memfasilitasi perdagangan dengan cara digital dan terstandarisasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu membumikan pemahaman terhadap ketentuan teknis ini agar sektor non-migas nasional benar-benar dapat memanfaatkan peluang yang terbuka, termasuk kesederhanaan prosedur, tarif preferensial, dan fleksibilitas aturan asal. Dengan demikian, eksploitasi manfaat teknis RCEP menjadi krusial dalam memperkuat kinerja ekspor non-migas dan memperdalam integrasi perdagangan regional.

RCEP juga mengintegrasikan prinsip-prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan prediktabilitas yang menjadi fondasi utama dari FTA multilateral modern. Contohnya, Pasal 17.4 dalam Bab XVII (Transparency and Anti-Corruption) mewajibkan semua negara anggota untuk secara proaktif mempublikasikan peraturan perdagangan dan menyampaikan notifikasi perubahan kepada mitra dagang secara berkala, dalam rangka menghindari praktik

⁶⁴ RCEP Agreement, Article 2.3.

⁶⁵ RCEP Agreement, Article 2.20

proteksionisme terselubung.⁶⁶ Selain itu, Pasal 3.2 dalam Bab III (Rules of Origin) menetapkan penggunaan sistem sertifikasi asal barang yang seragam dan bersifat akumulatif, memungkinkan bahan baku dari berbagai negara anggota dihitung secara kolektif sebagai “berasal dari kawasan RCEP”.⁶⁷ Ketentuan ini merupakan pembeda RCEP dibanding FTA konvensional karena memberikan fleksibilitas tinggi bagi sektor manufaktur dan industri ekspor non-migas yang sangat bergantung pada komponen lintas negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RCEP tidak hanya memenuhi syarat sebagai FTA dari sisi formal (berdasarkan komitmen liberalisasi tarif, jasa, dan investasi), tetapi juga secara substantif mengadopsi nilai-nilai modern dari integrasi ekonomi global. Karakteristik multilateral RCEP tampak dari skema “*ASEAN centrality*” yang menjaga keseimbangan kepentingan negara besar dan kecil, serta dari luasnya cakupan pasal yang melampaui perdagangan konvensional hingga mencakup isu kontemporer seperti UMKM, e-commerce, dan persaingan usaha.⁶⁸ Oleh sebab itu, memahami RCEP sebagai FTA multilateral berarti juga memahami dinamika arsitektur perdagangan abad ke-21, di mana liberalisasi bukan semata soal tarif, tetapi juga penciptaan rezim normatif yang mendukung efisiensi dan keadilan dalam sistem perdagangan internasional. Dalam konteks Indonesia, penguatan pemahaman terhadap fungsi dan isi teknis RCEP sangat penting untuk memastikan pemanfaatan maksimal di sektor-sektor

⁶⁶ RCEP Agreement, Chapter 17, Article 17.4.

⁶⁷ RCEP Agreement, Chapter 3, Article 3.2.

⁶⁸ ASEAN Secretariat, *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP*, 2012, <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Guiding-Principles-and-Objectives-for-the-RCEP.pdf>

strategis, terutama sektor non-migas yang menjadi tumpuan ekspor jangka panjang dan diversifikasi ekonomi nasional.⁶⁹

B. Peta Sektor Non-Migas Sebelum dan Sesudah RCEP

Indonesia menempati posisi strategis dalam RCEP sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan pusat produksi kawasan. Sebagai bagian dari blok RCEP, Indonesia berperan sebagai hub produksi yang menghubungkan rantai pasok antara negara ASEAN dan mitra seperti Tiongkok, Jepang, serta Korea Selatan. Hal ini sesuai dengan teori integrasi ekonomi regional yang mengatakan bahwa negara dengan keunggulan komparatif tertentu dapat berfungsi sebagai pusat agregasi input serta manufaktur. Posisi ini semakin relevan karena Indonesia memiliki basis industri padat karya—terutama tekstil, alas kaki, serta produk elektronik—sehingga berpotensi menjadi pusat manufaktur untuk pasar regional RCEP.⁷⁰ Kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan RCEP didukung oleh beberapa aspek penting yaitu regulasi, kelembagaan, dan kesiapan teknis. Secara regulasi, pemerintah telah melakukan harmonisasi berbagai peraturan domestik—meliputi sertifikasi mutu, prosedur ekspor-impor, hingga peraturan bea cukai—agar selaras dengan standar RCEP yang mulai diberlakukan sejak Januari 2022. Kelembagaan, berupa koordinasi lembaga lintas kementerian seperti Kemlu, Kemendag, dan BKPM, difokuskan pada peningkatan kapabilitas pengawasan, informasi, dan pelayanan FTA. Sementara aspek teknis diupayakan melalui sosialisasi aturan asal

⁶⁹ Kementerian Perdagangan RI, *RCEP dan Potensi Hemat Tarif untuk Ekspor Non-Migas Indonesia*, 2021, <https://kemendag.go.id>

⁷⁰ ASEAN Secretariat. *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP*. 2012. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Guiding-Principles-and-Objectives-for-the-RCEP.pdf>

barang (rules of origin/CoO), skema exporter approved, serta digitalisasi prosedur kepabeanaan melalui National Single Window.⁷¹

Analisis evolusi sektor non-migas Indonesia sebelum dan setelah berlaku RCEP menunjukkan perubahan signifikan terutama dari sisi diversifikasi produk, volume ekspor, dan arah pasar. Sebelum RCEP—yaitu pada periode 2018–2021—struktur ekspor non-migas Indonesia sudah menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat, meningkat dari US\$162,84 miliar pada 2018 menjadi US\$219,36 miliar pada 2021, sebagai sinyal pemulihan akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah terkait stabilisasi ekonomi⁷². Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh sektor manufaktur seperti tekstil, alas kaki, elektronik, serta produk pertanian dan kehutanan berbasis hilirisasi. Memasuki tahun 2022—periode awal implementasi RCEP sejak 1 Januari—nilai ekspor non-migas terus melanjutkan tren positif. Data BPS menunjukkan bahwa Ekspor non-migas pada Februari 2022 mencapai US\$19,47 miliar, naik 35,24% year-on-year dibandingkan Februari 2021. Sektor manufaktur mendominasi, mencatat pertumbuhan 29,57%, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 11,45%⁷³. Produk seperti mineral fuels, besi & baja, serta tekstil menjadi penggerak utama kenaikan nilai ekspor di awal tahun 2022.

Tabel 4.1: Nilai Ekspor Non-Migas Indonesia 2018–2022 (US\$ miliar)

Tahun	Ekspor Non-Migas	Keterangan
-------	------------------	------------

⁷¹ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *RCEP – Implementation and Challenges*. 2024. https://unctad.org/system/files/non-official-document/aldc_2024_roo_rt_schindler_rcep_7-nov_ppt.pdf

⁷² ITAKURA, Ken (2022), *ERIA Discussion Paper 451: Impact of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.

⁷³ Badan Pusat Statistik, “Exports in February 2022 reached US\$20.46 billion...”, 15 Maret 2022.

Tahun	Ekspor Non-Migas	Keterangan
2018	162.84	Awal tahun pra-RCEP
2019	155.89	Turun akibat tekanan global
2020	154.94	Dampak pandemi COVID-19
2021	219.36	Pemulihan ekonomi
2022	275.91	Pra-RCEP penuh

Sumber: ITAKURA (2022) untuk 2018-2021;

Riset Serafica & Ramli (2022) untuk 2022

Peta sektor ekspor non-migas Indonesia mengalami transformasi signifikan sebelum dan sesudah implementasi awal dari perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang berlaku mulai 1 Januari 2022. Sebelum RCEP resmi berlaku, yakni pada rentang 2018 hingga 2021, ekspor non-migas Indonesia menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif akibat berbagai faktor eksternal, seperti perang dagang AS-Tiongkok dan pandemi COVID-19. Pada tahun 2018, nilai ekspor non-migas Indonesia mencapai USD 162,84 miliar dan sempat menurun menjadi USD 154,94 miliar pada 2020 karena disrupsi rantai pasok global dan perlambatan ekonomi dunia. Namun, pada 2021 nilai ini melonjak menjadi USD 219,36 miliar, menandai pemulihan ekonomi nasional serta meningkatnya permintaan global terhadap komoditas ekspor utama Indonesia seperti kelapa sawit (CPO), karet, tekstil, dan produk logam dasar⁷⁴. Setelah RCEP mulai berlaku pada 1 Januari 2022, sektor non-migas Indonesia

⁷⁴ Itakura, K. (2022). *Impact of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. ERIA Discussion Paper Series No. 451. <https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/FY22/Impact-of-RCEP.pdf>

mendapatkan angin segar melalui akses pasar yang lebih luas dan preferensi tarif yang kompetitif. Pada tahun 2022, nilai ekspor non-migas Indonesia kembali melonjak hingga mencapai USD 275,91 miliar—tertinggi sepanjang sejarah perdagangan luar negeri Indonesia⁷⁵. Sektor-sektor yang mencatat pertumbuhan signifikan antara lain produk manufaktur seperti tekstil dan garmen, alas kaki, elektronik dan komponen, serta kelapa sawit. Salah satu dampak langsung dari RCEP adalah penyederhanaan *rules of origin* (aturan asal barang) yang memungkinkan produk Indonesia dengan bahan baku dari negara anggota RCEP tetap memenuhi syarat sebagai produk asal kawasan, sehingga berhak atas preferensi tarif.

Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai regional, terutama di sektor manufaktur dan elektronik⁷⁶. Secara geografis, ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara mitra RCEP juga meningkat secara tajam, terutama ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Ekspor Indonesia ke Tiongkok, misalnya, melonjak dari USD 29,94 miliar pada 2020 menjadi USD 63,46 miliar pada 2022, menjadikan Tiongkok sebagai mitra dagang utama dalam kerangka RCEP⁷⁷. Di sisi lain, implementasi awal RCEP juga mendorong peningkatan investasi langsung asing (FDI) ke sektor-sektor terkait ekspor non-migas, seperti industri pengolahan logam dan petrokimia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri juga aktif melakukan sosialisasi manfaat RCEP kepada pelaku usaha, khususnya terkait penerapan *Certificate of*

⁷⁵ Badan Pusat Statistik. (2022). *Berita Resmi Statistik – Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Tahun 2022*. <https://www.bps.go.id/pressrelease>

⁷⁶ Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. (2022). *Implementasi Awal RCEP di Indonesia*. <https://www.kemendag.go.id>

⁷⁷ ASEANStats. (2022). *ASEAN Trade Statistics Database*. <https://www.aseanstats.org>

Origin (COO) Form RCEP dan pemanfaatan tarif preferensial. Namun, tantangan masih tersisa, terutama terkait literasi pelaku UMKM terhadap ketentuan RCEP, kesiapan infrastruktur logistik, dan perlunya harmonisasi regulasi ekspor⁷⁸. Dengan demikian, RCEP telah berperan sebagai pengungkit penting dalam memperluas dan memperkuat kinerja ekspor non-migas Indonesia di tahun pertama implementasinya. Walaupun RCEP belum berjalan secara penuh karena beberapa negara mitra baru menyelesaikan ratifikasi pada pertengahan hingga akhir 2022.

Data awal lainnya juga menunjukkan bahwa ekspor non-migas Indonesia ke negara anggota RCEP menunjukkan tren positif hingga akhir 2021. Misalnya, ekspor produk tekstil meningkat sebesar 12% (USD 15 miliar) dibandingkan tahun sebelumnya, sementara ekspor CPO, elektronik, dan alas kaki meningkat rata-rata 8–10% setiap tahunnya. Tren ini menandai kesiapan struktural Indonesia dalam mengakses pasar RCEP sebelum perjanjian resmi berlaku. Implementasi aturan asal barang melalui COO Form RCEP menjadi indikator keberhasilan awal pemanfaatan tarif preferensial. Indonesia telah menerapkan skema *Approved Exporter*, memperbolehkan eksportir terverifikasi menerbitkan pernyataan asal barang tanpa perlu sertifikat fisik. Namun, sosialisasi ini masih menghadapi tantangan, terutama di kalangan UMKM yang belum sepenuhnya memahami prosedur administratif dan syarat teknis guna penerbitan CoO. Wawancara dengan Bapak Erwin Muhammad Akbar menunjukkan bahwa pemerintah sedang

⁷⁸ Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Laporan Pemahaman UMKM terhadap Perjanjian RCEP*. <https://www.kemenkopukm.go.id>

mengembangkan modul pelatihan dan panduan digital untuk menjangkau pelaku usaha micro dan kecil di daerah⁷⁹.

Peran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, serta lembaga teknis seperti BKPM sangat nyata dalam mendorong pemanfaatan RCEP. Kemlu aktif melakukan diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar baru sekaligus melindungi kepentingan ekspor Indonesia. Kemendag melalui Pusat Layanan Ekspor memberikan sosialisasi dan bantuan teknis sertifikasi keuangan serta aturan perdagangan. BKPM mendukung investasi asing melalui penghapusan kendala perizinan dan penguatan mekanisme one-stop service bagi investor sektor non-migas. Dalam wawancara, Erwin Muhammad Akbar menegaskan bahwa strategi Indonesia dalam memaksimalkan RCEP terfokus pada tiga aspek utama: memperluas basis eksportir non-migas yang memakai CoO, memperkuat layanan informasi & regulasi di daerah, dan mendorong integrasi vertikal dalam rantai pasok industri kawasan. Menurut beliau, “Pemerintah berkomitmen menjadikan RCEP sebagai lokomotif ekspor non-migas melalui penguatan kapasitas teknis pelaku usaha dan digitalisasi prosedur regulasi”⁸⁰.

Seiring dengan adanya perjanjian RCEP pemanfaatan mitra dagang utama Indonesia semakin menguat dan harga komoditas ekspor unggulan yang dimiliki oleh Indonesia juga semakin mengalami peningkatan. Dalam data yang diedarkan oleh menteri ekonomi tertulis “neraca perdagangan mengalami pertumbuhan sebesar 146,6 persen secara YoY dan sebesar 66,7 persen secara

⁷⁹ "Impact of RCEP on Trade Balance and Indonesia's Potential Export." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 7, no. 2 (2023).
https://www.researchgate.net/publication/376897079_IMPACT_OF_RCEP_ON_TRADE_BALANCE_AND_INDONESIA%27S_POTENTIAL_EXPORT

⁸⁰ Erwin Muhammad Akbar, interview by peneliti via Zoom, 2022.

QtQ pada triwulan II tahun 2022. Surplus pada total neraca perdagangan pada triwulan II tahun 2022 terutama disumbang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang mencapai USD 21,9 miliar. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mencatat nilai yang defisit.⁸¹ Dengan adanya surplus yang didapatkan oleh Indonesia diatas, secara total nilai perdagangan kita mengalami peningkatan pada tahun ini. Jika Indonesia terus menerima surplus ekonomi dalam sector perdagangan, bukan tidak mungkin jika Indonesia akan mengalami kemajuan dalam pembangunan Negara.

Uraian	2021	2022	
	Q4	Q1	Q2
	juta USD		
Neraca Total	10.259,8	9.332,1	15.554,1
Ekspor Total	67.233,6	66.144,1	74.924,2
Impor Total	56.973,8	56.812,0	59.370,1
Neraca Nonmigas	15.109,6	14.654,7	21.932,5
Ekspor Nonmigas	63.782,5	62.843,0	70.462,1
Impor Nonmigas	48.672,9	48.188,3	48.529,6
Neraca Migas	-4.849,8	-5.322,6	-6.378,4
Ekspor Migas	3.451,1	3.301,1	4.462,1
Impor Migas	8.300,9	8.623,7	10.840,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 4.2 Surplus Perdagangan Non-migas

Sumber : Badan Pusat Statistik

“Pada triwulan II tahun 2022, surplus perdagangan nonmigas didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar US\$ 62,14 juta pada kuartal pertama sedangkan pada kuartal kedua mempunyai nilai sebesar US\$ 70,46 juta. Pada triwulan II tahun 2022, impor nonmigas juga mengalami pertumbuhan pada

⁸¹ Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Mei 2022, Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, 2022.

kuartal pertama senilai US\$ 48,18 juta dan pada kuartal kedua naik menjadi US\$ 48,52 juta. Kinerja impor yang meningkat secara baik ditopang oleh peningkatan impor bahan baku dan barang modal sehingga menggambarkan ekspansi produksi dalam negeri.⁸²

Dari data yang dipaparkan di atas, bisa diambil penilaian bahwa pada pertengahan tahun 2022 Indonesia mengalami pertumbuhan dalam sektor ekspor positif pada triwulan kedua pada tahun ini. Tentu ini menjadi kabar baik bagi Negara pasca turunnya nilai ekonomi yang diakibatkan oleh pandemic covid-19.

Uraian	Nilai Q2 2022 (juta USD)	Growth (%)		Share thd Total* (%)
		QtQ	YoY	
Ekspor Nonmigas	70.462,1	12,1	38,7	94,0
Pertanian	1.055,3	-8,7	16,1	1,4
Industri Pengolahan	51.487,9	1,9	22,3	68,7
Pertambangan dan lainnya	17.918,9	60,4	130,1	23,9

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 4.3 Surplus Perdagangan Non-migas

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sedangkan beberapa jenis bahan ekspor nonmigas yang mengalami pertumbuhan bisa kita lihat sesuai data di atas. pada table laporan diatas ada tiga jenis bahan ekspor nonmigas yang mengalami pertumbuhan seperti berikut, pertanian dengan total perkembangan 1,4% atau senilai US\$ 1,05 juta, industri pengolahan dengan total 68,7% atau senilai US\$ 51,48 juta dan pertambangan lainnya total dengan 23,9% atau senilai US\$ 17,91 juta.

⁸² Ibid.

Pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan menjadi sector yang paling tinggi pertumbuhannya dibandingkan sektor lainnya sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada triwulan II tahun 2022 yang menunjukkan hasil kapasitas produksi yang terpakai untuk sektor Industri dan Pengolahan semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah yang kondusif dalam meningkatkan nilai ekonomi negaradan kesejahteraan masyarakat. Tingginya pertumbuhan ekspor dalam sektor Industri Pengolahan juga didukung oleh tingginya permintaan di tengah distrupsi pasokan global sehingga membuat harga komoditas terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekspor nonmigas yang tinggi juga didorong oleh pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, sementara itu sektor Pertanian mengalami juga mengalami kenaikan. Hasil SKDU mengatakan bahwa kegiatan usaha pada triwulan selanjutnya akan semakin menguat dengan didukung oleh kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Industri Pengolahan yang semakin baik sejalan dengan ketersediaan sarana produksi dan peningkatan permintaan domestik. Tapi diisisi lain, bahan ekspor pada sektor Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan mengalami perlambatan.

Kode HS: Uraian	Nilai Q2 2022 (juta USD)	Growth (%)		Share thd Ekspor Nonmigas (%)
		QtQ	YoY	
Bahan Bakar (27)	15.289,1	72,4	125,4	21,7
Besi dan Baja (72)	7.824,4	17,5	51,9	11,1
Lemak & Minyak Hewan / Nabati (15)	7.221,8	-8,8	1,4	10,2
Mesin / Peralatan Listik (85)	3.510,8	6,2	21,9	5,0
Bijih, Kerak dan Abu Logam (26)	2.733,2	11,9	80,5	3,9
Kendaraan dan Bagiannya (87)	2.518,2	3,0	23,2	3,6
Berbagai Produk Kimia (38)	2.404,1	10,0	49,3	3,4
Alas Kaki (64)	1.958,1	-2,0	41,9	2,8
Karet dan Barang dari Karet (40)	1.772,5	2,5	-1,8	2,5
Mesin-mesin / Pesawat Mekanik (84)	1.654,6	-9,8	5,7	2,3

Sumber: CEIC data

Tabel 4.4 Data Ekspor

Sumber : CEIC Data

Selanjutnya bisa dilihat dari tabel di atas, golongan Besi dan Baja (HS 72) memiliki *share* nilai ekspor terbesar kedua dengan pertumbuhan sebesar 51,9 persen (YoY) dan 17,5 persen (QtQ) pada triwulan II tahun 2022. Pertumbuhan ekspor golongan Besi dan Baja ini sejalan dengan permintaan dunia yang masih kuat dan harga komoditas global yang tinggi. Permintaan golongan Besi & Baja khususnya dari Tiongkok juga diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas konstruksi terkait infrastruktur. Sementara itu, golongan Produk Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (HS 15) memiliki *share* terbesar ketiga ekspor non migas dengan pertumbuhan sebesar 1,4 persen (YoY), namun berkontraksi sebesar 8,8 persen (QtQ) pada triwulan II tahun 2022. Perlanbatan pertumbuhan ekspor golongan Produk Lemak dan Minyak Hewan/Nabati secara YoY dan kontraksi secara QtQ utamanya disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang diberlakukan oleh pemerintah selama periode

28 April 2022 hingga 22 Mei 2022. Kebijakan larangan ekspor CPO ini menyebabkan penurunan ekspor HS 15 yang signifikan pada Bulan Mei 2022, dimana tercatat pertumbuhan ekspor golongan ini mengalami kontraksi sebesar 71,79 % persen (MtM).⁸³

Uraian	Nilai Q2 2022 (juta USD)	Growth (%)		Share thd Ekspor Nonmigas (%)
		QtQ	YoY	
RRT	15.175,1	19,3	31,2	21,5
ASEAN	14.590,3	21,4	40,8	20,7
Amerika Serikat	6.974,1	-10,5	17,7	9,9
India	6.886,6	52,1	159,7	9,8
Jepang	5.761,1	13,7	51,7	8,2
Uni Eropa	5.148,2	0,1	21,6	7,3
Malaysia	3.683,8	11,3	40,1	5,2
Singapura	2.876,6	23,1	42,2	4,1
Korea Selatan	2.763,0	-0,9	46,0	3,9
Taiwan	2.241,0	38,3	58,3	3,2
Thailand	1.893,8	16,2	28,5	2,7
Belanda	1.405,4	3,8	31,1	2
Australia	915,5	22,3	18,8	1,3
Jerman	787,3	-6,8	19,9	1,1
Italia	773,1	6,1	20,7	1,1

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.5 Mitra Dagang Ekspor

Sumber : Badan Pusat Statistik

ASEAN, dan Uni Eropa merupakan mitra dagang tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan nilai ekspor ke masing-masing negara mencapai USD15,2 miliar, USD7 miliar, USD6,9 miliar, USD14,6 miliar, dan USD5,1 miliar. Secara tahunan, ekspor nonmigas ke seluruh mitra dagang utama mengalami pertumbuhan, dimana kenaikan pertumbuhan ekspor nonmigas tertinggi adalah ke India yang mencapai 159,7 persen (YoY). Pertumbuhan ekspor nonmigas ke seluruh mitra dagang utama dikarenakan permintaan yang menguat

⁸³ Mulai 28 April, Pemerintah Berlakukan Larangan Ekspor CPO dan Turunannya, Berita, Sekretariat Kabinet RI, April 2022. <https://setkab.go.id/mulai-28-april-pemerintah-berlakukan-larangan-ekspor-cpo-dan-turunannya/>.

ditengah ketidakpastian global.⁸⁴ Jika dilihat dari perkembangan dalam sector ekspor, baik dari sector ekspor migas baik ekspor non-migas. Adanya perjanjian dagang internasional seperti RCEP bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus mengembangkan kekuatan ekonomi melalui sector ekspor dan impor.

Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memanfaatkan peluang dari Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), perjanjian dagang terbesar di dunia yang mencakup 15 negara Asia-Pasifik. Setelah diratifikasi dan mulai berlaku bagi Indonesia pada 2 Januari 2023, pemerintah mempercepat reformasi di bidang perdagangan, investasi, serta logistik nasional melalui program seperti National Logistics Ecosystem (NLE) untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menurunkan biaya logistik.⁸⁵

Menurut Kementerian Perdagangan, partisipasi Indonesia dalam RCEP diperkirakan dapat meningkatkan ekspor nasional ke negara-negara anggota sebesar 8-11% dalam lima tahun ke depan.⁸⁶ Dalam menghadapi era RCEP, Indonesia juga menyiapkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih kompetitif di pasar global. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, sekitar 30% UMKM telah terhubung ke platform digital, mendukung target nasional untuk mendigitalisasi 30 juta UMKM pada 2025. Berbagai pelatihan ekspor, sertifikasi produk, dan pendampingan perluasan pasar internasional terus diperluas, dengan fokus pada sektor potensial seperti produk makanan olahan, tekstil, dan furnitur. Dengan langkah ini,

⁸⁴ Siaran Pers Laporan Perekonomian Triwulan II TAHUN 2022, Bank Indonesia, Loc. Cit

⁸⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Penguatan National Logistics Ecosystem dalam Mendukung RCEP*, 2023.

⁸⁶ Kementerian Perdagangan RI, *Outlook Ekspor Indonesia Pasca-RCEP*, 2023.

Indonesia berupaya tidak hanya menjadi pasar konsumtif, tetapi juga pusat produksi di kawasan Asia-Pasifik.⁸⁷ Namun, Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan untuk memaksimalkan manfaat RCEP, seperti infrastruktur yang belum merata dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam Global Competitiveness Index 2023 yang dirilis World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 141 negara menunjukkan perlunya akselerasi inovasi dan teknologi. Sebagai respons, pemerintah mengintensifkan promosi investasi, memperkuat sistem OSS (Online Single Submission), serta menawarkan berbagai insentif fiskal untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI). Dengan strategi ini, Indonesia optimistis dapat mengoptimalkan RCEP untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis inovasi dan keberlanjutan.⁸⁸

Pembentukan perjanjian perdagangan RCEP dinilai mempunyai potensi transaksi perdagangan yang lebih lebih menguntungkan karena pada perjanjian ini biaya masuk di turunkan. Sebagian besar dari isi perjanjian RCEP akan memberikan keuntungan bagi Negara-negara yang memiliki ekspor lumayan besar. Bila kesepakatan RCEP berlaku maka lebih dari 30 persen PDB dunia atau potensi pasarnya sebesar USD21,6 triliun akan berada di kawasan ini. Sekitar 50 persen populasi dunia juga berada di kawasan RCEP ini. Hal ini berarti potensi konsumen atau pasar sangat menjanjikan. Ditaksir hampir 30 persen perdagangan dunia akan berada di kawasan ini.⁸⁹ Selain kenaikan pada sektor ekspor dan investasi, perjanjian RCEP juga mempunyai potensi menaikkan Pendapatan

⁸⁷ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Laporan Perkembangan Digitalisasi UMKM*, 2024.

⁸⁸ World Economic Forum, *Global Competitiveness Report 2023*.

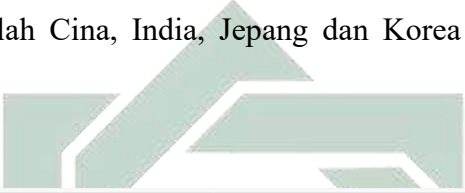
⁸⁹ Dedi Parna *Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership* Jurnal 2020.

Domestik Bruto Indonesia. Berdasarkan kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2019, “dikatakan bahwa GDP Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,05% selama periode 2021 sampai 2032 bila perjanjian RCEP terlaksana. Sebaliknya jika perjanjian RCEP tidak terlaksana, maka Indonesia akan mengalami penurunan GDP sebesar 0,07% selama periode 2021 sampai 2032.”⁹⁰ Dilihat dari sisi lain, dengan terbukanya akses pasar dengan negaranegara anggota RCEP sangat diharapkan Indonesia akan dapat memanfaatkannya dengan cara meningkatkan perdagangan antar negara anggota RCEP sehingga mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara. manfaat lain yang bisa diharapkan dari bergabungnya Indonesia dalam perjanjian RCEP ini adalah gampangya Indonesia dalam mendapatkan bahan baku untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara.

Hal lain yang diatur dalam perjanjian RCEP ialah terdapat beberapa ketentuan mengenai kriteria produk sebagai syarat agar bisa mendapatkan tarif preferensi di negara-negara anggota RCEP sebagai tujuan ekspor. Hal ini bisa meningkatkan kualitas barang yang hendak di ekspor dan di impor oleh Negara-negara anggota RCEP sehingga ini akan menjadi kabar yang sangat baik untuk Negara yang hendak melakukan impor bahan baku sebagai modal untuk memproduksi barang yang akan dinikmati untuk negaranya maupun barang yang hendak digunakan sebagai barang ekspor. jika kita lihat dari sisi perdagangan barang, ada potensi besar untuk Indonesia mengeksport beberapa barang dagangan agar masuk ke beberapa negara mitra RCEP, meskipun barang unggulan ekspor

⁹⁰ Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Mei 2022, Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, 2022.

ini bukan merupakan produk dengan teknologi tinggi, namun perihal kualitas barang bisa kita jamin perihal kualitasnya. Karena sebagian besar barang unggulan Indonesia dalam hal ekspor adalah produk manufaktur, antara lain minyak nabati dari CPO, karet dan produk karet, plywood, foot wear, beberapa produk olahan ikan dan lain-lain. Selama ini negara tujuan produk ekspor unggulan ini adalah Cina, India, Jepang dan Korea Selatan. seperti data sebagai berikut:



No	Komoditi	Negara Tujuan	Tarif di Negara Mitra	Ekspor 2012-2015 (Juta USD)
1	Palm Oil	China	9%	6.162
2	Palm Stearin	China	8%	1.317
2	Karet (TNSR)	China	20%	3.528
3	Plywood	China	5-10%	1.720
4	Styrene	China	2%	312
5	Kertas	China	5%	230
6	Komponen Kendaraan bermotor	China	5%	123
7	Palm Oil	India	80%	9.854
8	RBD Palm Oil	India	90%	5.001
9	Karet (TNSR)	India	20%	1.199
10	Palm Kernel Oil	India	100%	634
11	Fatty Acid	India	15%	276
12	Kopi	India	100%	126
13	Palm olein	India	80%	114
14	Terephthalic acid	India	8%	110
15	Plywood	Jepang	10%	2.818
16	Sepatu	Jepang	2,20%	588
17	Olahan Tuna	Jepang	6,30%	168
18	Ikan Tuna segar	Jepang	3,50%	127
19	Ikan Tuna beku	Jepang	3,50%	103
20	Lubricating base oil	Korea	5%	794
21	Plywood	Korea	5-10%	353
22	Stearic acid	Korea	5%	181

Sumber: BPS, data 2012 – 2015.

Tabel 4.6 Data Tujuan Produk Unggulan

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sedangkan kendala yang akan banyak dialami oleh Indonesia sendiri dalam hal ekspor barang adalah tarif barrier yang masih sangat tinggi. Bisa kita lihat seperti dalam table diatas seberapa tingginya tariff barrier Indonesia dalam melakukan ekspor barang. Rata-rata tariff barrier dalam ekspor barang masih di atas 5 persen dan bahkan ada tariff barrier yang sampai sebesar 80%, 90%, hingga 100% seperti

yang ada di tabel di atas.⁹¹ Jika dilihat dari tabel di atas, bisa ditemukan produk unggulan Indonesia yang bisa meningkat hasilnya ketika tariff barrier dikurangi. Dilihat dari Tabel diatas juga, produk unggulan Indonesia yang bisa ditingkatkan dalam bidang ekspor adalah produk CPO. Produk ekspor ini terus mengalami peningkatan jumlah produksinya di Indonesia, seperti kelapa sawit yang jumlah lahan pertaniannya makin meningkat, hal ini tentunya sejalan dengan keuntungan yang akan di dapatkan ketika tariff barrier ditiadakan. Sebagaimana dijelaskan di atas, untuk menganalisis kesiapan pelaku domestik Indonesia menghadapi perjanjian perdagangan yaitu RCEP yang menjadi fokus tulisan ini, dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang tersedia untuk mendapatkan akses pasar ke negara mitra atau yang biasa dikenal sebagai strategi ofensif. Aspek kedua adalah kemampuan untuk berdaya saing dengan produk-produk dari negara mitra yang masuk ke pasar Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai strategi defensif. RCEP menyediakan akses pasar tanpa tarif bagi masuknya produk-produk Indonesia ke Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian RCEP. Akses tersebut mencakup untuk beberapa produk seperti misalnya ekspor migas, Non, migas otomotif, olahan kayu termasuk furniture, tekstil, barang-barang elektronik, dll. Melalui akses pasar ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk tersebut dibandingkan dengan sesama negara ASEAN. Namun, seperti halnya perjanjian perdagangan yang lazimnya berlaku, keuntungan dan kerugian akan dirasakan secara tidak merata di beberapa sektor. Keuntungan dari perjanjian

⁹¹ Badan Pusat Statistik, Data Tahun 2012-2015.

dangang RCEP diprediksi terutama akan diraih sektor ekspor non-migas Indonesia karena mendapatkan akses pasar ke Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian RCEP. Kondisi ini berbeda dengan sektor migas yang dikhawatirkan tidak akan mendapat manfaat dalam waktu dekat apabila dibandingkan dengan sektor non-migas. Oleh karena itu, meskipun RCEP memberikan peluang bagi masuknya produk Indonesia dengan zero tarif namun dalam prakteknya, kesempatan tersebut hanya akan dapat dimanfaatkan oleh beberapa sektor saja setidaknya dalam waktu dekat.

Tidak adanya tarif bea masuk yang diberlakukan oleh negara mitra, tidak serta merta memudahkan produk-produk Indonesia dapat leluasa masuk ke pasar mitra. Terdapat sejumlah ketentuan yang biasanya menyangkut standar produk baik dari sisi teknis, lingkungan hidup, kesehatan maupun perlindungan terhadap buruh yang musti dipenuhi agar produk asing dapat dipasarkan di negara mitra. Oleh karena itu agar dapat memanfaatkan akses pasar yang tersedia, perlu dipastikan juga kesiapan para pelaku bisnis Indonesia terkait pemahaman yang utuh atas ketentuan dan kebijakan yang berlaku di negara mitra. Produk-produk Indonesia dapat terhambat untuk masuk ke pasar mitra apabila tidak memenuhi persyaratan teknis, maupun standar kesehatan dan perlindungan terhadap lingkungan yang berlaku. Di satu sisi, pemenuhan standar tersebut dapat dilihat sebagai hambatan, namun di sisi lain, upaya untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan negara mitra dapat dilihat pula sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas para pelaku bisnis domestik agar dapat mengembangkan bisnisnya di pasar internasional yang lebih luas. Dengan kata lain, dibebaskannya

tarif bea masuk ke negara mitra perlu disertai dengan kesiapan pelaku domestik untuk memanfaatkan peluang yang ada tersebut.

Menurut Erwin Muhammad Akbar peluang Indonesia dalam pemanfaatan RCEP yaitu pasar yang sangat luas tarif berkurang sehingga pelaku usaha (produsen) dapat semakin banyak pilihan untuk memasarkan produk produknya ke pasar dunia. Selain itu juga ada peluang investasi dari negara yang tergabung dalam RCEP kemudian yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan perjanjian RCEP tersebut yaitu daya saing di dalam negeri masih rendah artinya dari sisi kuantitas serta kualitas barang serta jasa yang ditawarkan perlu diperkuat dengan cara meningkatkan kapasitas, pelatihan, Pendidikan dan juga bantuan dari aspek aspek lainnya seperti keuangan , infrastruktur dan sebagainya. Kemudian komoditas dalam RCEP ini perlu menjadi fokus ditingkatkan daya saingnya, karena setiap negara yang ditargetkan sangat berbeda bobot komoditas perdagangannya,⁹² Oleh karena itu, pemanfaatan atas akses pasar ke mitra dagang internasional, yang mencerminkan kepentingan ofensif Indonesia, sangat tergantung pada keinginan pelaku domestik untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Dalam berbagai forum diskusi dengan para pelaku usaha yang diikuti penulis dalam kurun waktu 2017-2019, tampak bahwa pemanfaatan akses pasar ke mitra international masih belum menjadi prioritas sebagian besar pelaku bisnis domestik Indonesia setidaknya karena dua alasan utama Pertama, sebagian besar pelaku bisnis (seperti sektor ekspor non-migas Indonesia yang memiliki daya saing cukup tinggi) melihat pasar domestik Indonesia masih memberi

⁹² Wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin Akbar selaku Ministry of Foreign Affairs of the Republic Indonesia pada tanggal 24 November 2022

peluang yang besar dan belum digarap secara optimal. Kedua, seperti dijelaskan sebelumnya, meskipun hambatan yang bersifat tarif telah berkurang secara signifikan, non-tariff barriers di negara mitra masih sangat tinggi. Beberapa persoalan nontariff barriers yang dapat diidentifikasi antara lain, rumitnya regulasi yang harus dipenuhi di negara mitra, hingga kendala masalah bahasa terutama di negara mitra yang non berbahasa Inggris.

Upaya pemerintah untuk mendorong dan memastikan kesiapan pelaku domestik memanfaatkan kepentingan ofensif karenanya perlu untuk terus dilakukan. Jika tidak, maka kesempatan akses pasar yang terbuka menjadi tidak dapat memberi manfaat yang optimal bagi kepentingan ekonomi Indonesia. Terkait dengan aspek yang kedua mengenai daya saing, RCEP juga memberi peluang yang sama bagi masuknya produk-produk Negara-negara mitra untuk masuk ke pasar Indonesia dengan zero tariff. Kemudahan tersebut tentunya akan memberi tantangan tersendiri bagi para pelaku domestik terutama apabila produk Australia yang masuk menjadi kompetitor ketimbang menjadi pelengkap produk yang dihasilkan oleh produsen domestik. Dalam konteks ini, RCEP telah menyediakan kerangka kerja sama membangun kekuatan ekonomi di kawasan ASEAN dan Negara-negara mitra. Kerangka ini secara sederhana dapat dimaknai sebagai kerja sama kedua negara untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif (competitive advantage) masing-masing negara untuk saling melengkapi dalam rantai produksi yang menghasilkan produk akhir yang kemudian dapat diekspor ke negara lain. Misalnya saja, Indonesia dapat menjadi pemasok bahan baku nikel untuk industri baterai Australia. Sebaliknya, Australia dapat menjadi pemasok

bahan baku gandum untuk industri pengolahan makanan di Indonesia yang produk akhirnya dapat diekspor ke negara lain. Dengan memanfaatkan peluang dalam kerangka membangun kerja sama kekuatan ekonomi kawasan tersebut, produk-produk yang masuk dari Australia dapat dioptimalkan untuk menjadi pelengkap kebutuhan industri domestik Indonesia dan kemudian diekspor ke negara lain.

Sistem negara dibentuk ketika dua negara atau lebih memiliki cukup kontak di antara mereka dan memiliki dampak yang mencukupi pada keputusan satu sama lain untuk membuat perilaku masing – masing elemen yang dibutuhkan dalam kalkulasi pihak lain. Masyarakat negara (atau masyarakat internasional) hidup ketika sekelompok negara, sadar akan kepentingan dan nilai bersama tertentu membentuk masyarakat dalam hal bahwa mereka memandang dirinya terikat oleh seperangkat aturan bersama dalam hubungan satu sama lain dan berbagi dalam menjalankan institusi bersama.

1. Rezim Internasional RCEP

Menurut Erwin Muhammad Akbar Indonesia merupakan negara penggagas pertama untuk hubungan kerjasama di RCEP pada tahun 2011 kemudian juga Indonesia bertindak sebagai negara koordinator perundingan TNC selama hampir 8 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Posisi Indonesia sangat dihargai serta di hargai sehingga mampu menjadi koordinator selama 8 tahun. RCEP sangat penting bagi Indonesia karena sangat strategis untuk mempersatukan 10 negara ASEAN serta negara mitranya, bukan hanya dalam segi perdagangan namun dari segala aspek sehingga menghindari

konflik.⁹³ Dengan penandatanganan RCEP menjadi sinyal bahwa negara di kawasan ASIA Pasifik memiliki komitmen untuk Kerjasama dengan prinsip prinsip perdagangan yang terbuka, adil, saling menguntungkan serta berdasarkan aturan. ⁹⁴ Kerja sama antar Negara di suatu kawasan seperti RCEP, merupakan hal penting yang berkaitan dengan system internasional. Jika menggunakan sudut pandang neoliberalisme rezim internasional adalah system yang bersifat anarkis. Konsekuensi yang harus diterima oleh Negara sebagai dasar tertinggi dan paling penting yang bertarung untuk bertahan dalam situasi yang penuh dengan konflik dan kepentingan masing-masing negara antara satu dengan yang lain. Namun, pada perkembangan rezim internasional muncul teori lain yang mengatakan bahwa rezim internasional bisa saja bersifat hierarkis, didalam system yang hierarki pasti mempunyai struktur yang akan membagi beberapa negara dalam status yang nantinya akan membentuk sistem negara dominan yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam sebuah perjanjian antar Negara. Terhadap upaya dari Negara yang mempunyai power untuk menciptakan tatanan atas negara-negara yang lebih lemah.⁹⁵

Tatanan yang ada di dunia ini memiliki pembagian Negara yang pertama Negara besar dan kecil, sedangkan yang kedua adalah pembagian negarabesar yang di bag menjadi dua yakni negara dominan (Superpower) dan negara besar. Negara dominan ialah negara yang kuat dalam kemampuan ekonomi, politik dan militer. kemungkinan hanya Amerika Serikat yang dikatakan masuk

⁹³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin Akbar selaku Ministry of Foreign Affairs of the Republic Indonesia pada tanggal 24 November 2022

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Rendi Prayuda, Syafari Harto dan Desri Gunawan "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis).

dalam golongan negara dominan. Sedangkan golongan yang kedua adalah negara besar, negara besar bisa diartikan sebagai negara yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi negara dominan. Negara yang termasuk dalam kelompok ini adalah China dan Russia. Kehadiran negara dominan dan negara besar dalam suatu kawasan seringkali menimbulkan persaingan dalam memperebutkan pengaruh.⁹⁶ Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa RCEP adalah sebuah perjanjian yang cukup penting bagi China, baik itu dari aspek ekonomi, politik, dan aspek strategis. Jika dilihat dari tujuan awalnya RCEP adalah sistem kerjasama yang diajukan oleh Negara-negara anggota ASEAN yang diharapkan bisa menjadi perjanjian yang mengintegrasikan Asia agar memiliki kesatuan entitas ekonomi yang lebih besar. Selain integrasi ekonomi, adanya RCEP juga diharapkan menjadi integrasi kawasan dengan liberalisasi perdagangan, yang bisa memperbaiki aturan perdagangan di kawasan asia.

Sejak awal pembentukan RCEP China sudah menunjukkan bahwa RCEP memiliki arti penting yang cukup besar baginya dalam upaya meningkatkan pengaruh di kawasan asia. Hal tersebut bisa terlihat dari China yang mempunyai peran aktif dalam mempromosikan percepatan negosiasi dalam RCEP. Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi motif dasar bagi China untuk berperan aktif dalam proses negosiasi RCEP. Yang pertama, bagi China RCEP adalah komponen penting dalam meningkatkan integrasi regionalnya sebagai respon dari keberadaan TPP dan Amerika Serikat. Yang kedua, China melihat

⁹⁶ Djuyandi, Yusa 2017. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok : Rajagrafindo Persada

RCEP bisa dijadikan sebagai instrumen memperkuat status dan pengaruhnya di kawasan asia. Dan yang ketiga, China bisa menaikkan *value* yang diakui oleh Negara-negara di kawasan asia melalui proses negosiasi kooperatif. Jika dilihat dari tiga hal tersebut dukungan china terhadap terbentuknya perjanjian RCEP pada dasarnya tidak hanya berkaitan pada aspek ekonomi saja, melainkan ada aspek-aspek politik dan strategis yang lebih penting bagi China.⁹⁷ Minat besar China terhadap perjanjian RCEP dan arti pentingnya dalam mendapatkan justifikasi melalui tiga motif di atas, China juga bisa menggunakan RCEP sebagai instrumen melakukan perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat di kawasan asia, namun mendapatkan keinginannya China perlu menawarkan subsidi yang cukup besar kepada Negara-negara di kawasan asia seperti yang ada di dalam perjanjian RCEP. Dalam hal ini RCEP dengan jelas akan menunjukkan proses China dalam mengambil perannya sebagai Great Power di kawasan asia, rencana ini tentu sangat berkaitan dengan Great Strategy China yang menempatkan Asia sebagai prioritas utamanya.⁹⁸

2. Pemanfaatan RCEP di Bidang Ekspor Non-Migas

Untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi dalam perubahan perekonomian dunia serta dalam rangka meningkatkan pemulihan dan penguatan perekonomian global, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada 15 November 2020. Perjanjian RCEP yang merupakan inisiatif dari Indonesia pada saat Indoensia menjadi Ketua ASEAN di 2011, pada saat itu Indonesia dipercaya

⁹⁷ Joshua Kurlantzick, 2007, *Charm offensive: How China's soft power is transforming the world*, New Haven, Connecticut: Yale University Press.

⁹⁸ Ibid.

untuk menjadi koordinator yang memimpin jalannya perundingan Perjanjian RCEP.⁹⁹ Keterlibatan penting Indonesia dalam terbentuknya perjanjian RCEP bukan tanpa alasan, salah satu alasan utama Indonesia adalah penguatan perdagangan di kawasan asia dan Negara mitra ASEAN. Negara anggota RCEP memiliki arti yang penting bagi perekonomian Indonesia sebagai tujuan ekspor (56%) dan sumber impor utama (65%) Indonesia pada tahun 2020. Adanya perjanjian RCEP memiliki keunggulan utama yang sangat penting yaitu menyederhanakan aturan FTA. Melalui mekanisme yang ada dalam RCEP hanya akan menggunakan satu jenis Surat Keterangan Asal (SKA) perdagangan yang bisa digunakan di seluruh kawasan perjanjian RCEP sehingga bisa menghemat biaya perdagangan. Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan potensi perdagangan dengan adanya perjanjian RCEP, dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi pada tahun kelima pasca diratifikasi RCEP dan RCEP berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara peserta sebesar 8 persen sampai 11 persen. Potensi juga berasal dari realisasi pertumbuhan ekspor Indonesia ke 15 negara RCEP yang mencapai 7,35 persen dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi ini bisa didapatkan oleh Indonesia dari ekspor, terutama ekspor nonmigas. Mengingat komoditi nonmigas Indonesia sedang mengalami perkembangan yang lumayan signifikan.¹⁰⁰

Dengan adanya perjanjian RCEP tentu Indonesia bisa mengambil keuntungan dari perjanjian RCEP, mengingat Indonesia yang kaya akan

⁹⁹ Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian “Pemanfaatan Perjanjian RCEP untuk peningkatan Daya saing dan menarik Investasi”

¹⁰⁰ Ibid.

sumber daya alam, terutama sumber daya alam nonmigas seperti kelapa sawit, tembaga, minyak nabati dan lain-lain. Hal ini tercatat juga pada tahun 2020 ada 10 produk utama yang 59,9% dari total nilai ekspor berasal dari komoditi nonmigas dan perdagangan nonmigas Indonesia kepada 10 negara tujuan utama yang berada di kawasan RCEP sebesar 69,7. Dengan adanya perjanjian perdagangan yang menghilangkan tariff barrier seperti yang ada dalam perjanjian RCEP ini tentunya akan mempermudah dan menambah keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia dalam bidang perdagangan terutama dalam ekspor nonmigas.

C. Potensi Komoditas Non-Migas Indonesia Sebelum RCEP

Ekspor non-migas Indonesia telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional sebelum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) resmi diberlakukan pada 1 Januari 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2021 mencapai USD 219,3 miliar, meningkat 41,5% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar USD 154,9 miliar.¹⁰¹ Komoditas unggulan yang mendominasi ekspor non-migas sebelum RCEP antara lain minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), produk tekstil dan alas kaki, elektronik, serta produk perikanan. Dominasi komoditas ini memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki struktur ekspor yang berorientasi pada sektor manufaktur berbasis sumber daya alam dan padat karya, yang memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi

¹⁰¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Ekspor 2021* (Jakarta: BPS, 2022), 5, <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/07/07/8f9d2d7c7f6f71-statistik-ekspor-2021.html>

nasional. CPO, sebagai komoditas andalan, menyumbang lebih dari 11% dari total ekspor non-migas Indonesia pada 2021, dengan nilai mencapai USD 29,3 miliar.¹⁰² Produk tekstil dan pakaian jadi juga menempati posisi penting, dengan kontribusi sekitar USD 10,5 miliar pada 2021.¹⁰³ Sementara itu, sektor alas kaki berhasil menembus nilai ekspor USD 5,8 miliar, yang sebagian besar ditujukan ke pasar Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa, tetapi juga memiliki potensi untuk memperluas pasar di kawasan Asia melalui perjanjian RCEP.¹⁰⁴ Elektronik, khususnya produk komponen dan peralatan listrik, memberikan sumbangan lebih dari USD 11 miliar, menegaskan bahwa industri ini menjadi bagian dari integrasi rantai pasok global yang penting bagi Indonesia.¹⁰⁵ Adapun sektor perikanan, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan komoditas lain, tetap menjadi bagian penting dari diversifikasi ekspor, dengan nilai lebih dari USD 5 miliar pada tahun 2021.¹⁰⁶

Kontribusi ekspor non-migas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga menunjukkan tren yang konsisten. Menurut Kementerian Perdagangan, sektor non-migas menyumbang sekitar 17% terhadap PDB pada tahun 2021.¹⁰⁷ Angka ini menunjukkan peran strategis ekspor non-migas dalam menopang stabilitas neraca perdagangan, terutama ketika harga minyak global

¹⁰² Kementerian Perdagangan RI, *Laporan Perdagangan 2021* (Jakarta: Kemendag, 2022), 12, <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/publication/laporan-perdagangan-2021>

¹⁰³ Badan Pusat Statistik (BPS), *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2021* (Jakarta: BPS, 2022), 8, <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/01/17/7e9df2-perkembangan-ekspor-dan-impor-desember-2021.html>

¹⁰⁴ Ibid., 11.

¹⁰⁵ World Integrated Trade Solution (WITS), *Indonesia Trade Statistics 2021*, diakses 15 September 2025, <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2021/TradeFlow/Export>

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Kementerian Perdagangan RI, *Laporan Perdagangan 2021*, 16.

berfluktuasi. Dengan demikian, ketergantungan Indonesia pada ekspor non-migas, khususnya CPO dan manufaktur padat karya, menjadi instrumen utama dalam menjaga surplus neraca perdagangan nasional. Namun, posisi daya saing Indonesia sebelum implementasi RCEP perlu dianalisis dalam konteks persaingan intra-kawasan. Mengacu pada data World Integrated Trade Solution (WITS), Indonesia menghadapi kompetisi ketat dengan Vietnam dan Malaysia di sektor tekstil dan alas kaki.¹⁰⁸ Vietnam, misalnya, mencatat nilai ekspor tekstil lebih dari USD 30 miliar pada 2021, jauh di atas Indonesia, berkat efisiensi produksi, ketersediaan infrastruktur, dan insentif investasi yang lebih kompetitif.¹⁰⁹ Malaysia, di sisi lain, masih menjadi pesaing kuat dalam komoditas berbasis kelapa sawit, meskipun skala produksi Indonesia lebih besar. Tiongkok, dengan industri elektroniknya yang masif, menjadi pesaing utama sekaligus mitra potensial dalam rantai nilai global.¹¹⁰

Secara teoretis, posisi Indonesia dapat dijelaskan melalui teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari David Ricardo, yang menekankan bahwa negara sebaiknya mengekspor komoditas yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibanding negara lain.¹¹¹ Dalam konteks ini, Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada CPO dan komoditas berbasis sumber daya alam. Namun, untuk bersaing pada sektor manufaktur seperti tekstil dan elektronik, Indonesia perlu meningkatkan daya saing absolut melalui perbaikan

¹⁰⁸ WITS, *Indonesia Trade Statistics 2021*.

¹⁰⁹ World Bank, *Vietnam Trade Statistics 2021*, diakses 15 September 2025, <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/VNM/Year/2021/TradeFlow/Export>

¹¹⁰ World Bank, *China Trade Statistics 2021*, diakses 15 September 2025, <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2021/TradeFlow/Export>

¹¹¹ David Ricardo, *On the Principles of Political Economy and Taxation* (London: John Murray, 1817).

infrastruktur, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menjadi penting karena dalam skema liberalisasi perdagangan seperti RCEP, persaingan tidak hanya ditentukan oleh tarif, tetapi juga oleh efisiensi produksi dan inovasi. Dengan demikian, potensi komoditas non-migas Indonesia sebelum RCEP memperlihatkan kekuatan besar di sektor CPO, tekstil, alas kaki, elektronik, dan perikanan. Namun, tanpa peningkatan daya saing struktural, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah atau produk bernilai tambah rendah dalam rantai pasok kawasan. Oleh karena itu, pemanfaatan RCEP pasca 2022 menjadi momentum krusial untuk memperbaiki kelemahan struktural sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia dalam perdagangan regional.

D. Peluang dan Tantangan Ekspor Non-Migas Indonesia dalam Kerangka RCEP

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai perjanjian dagang multilateral terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara kawasan Asia-Pasifik membawa dimensi baru bagi pola perdagangan internasional. Bagi Indonesia, RCEP tidak hanya menjadi simbol integrasi ekonomi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperluas akses pasar, memperdalam integrasi rantai nilai kawasan, serta memperkuat posisi dalam rantai pasok global. Namun, efektivitas pemanfaatannya tidak serta-merta terjadi secara otomatis, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan domestik, kemampuan adaptasi industri, serta dukungan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, analisis berbasis bukti mengenai peluang dan tantangan menjadi penting untuk

memahami sejauh mana RCEP dapat berfungsi sebagai katalis bagi ekspor non-migas Indonesia.

a. Peluang Ekspor Non-Migas Indonesia

1. Akses Pasar Baru dan Preferensi Tarif

RCEP menjanjikan liberalisasi hingga 90% pos tarif dalam jangka waktu 20 tahun.¹¹² Bagi Indonesia, hal ini sangat signifikan mengingat produk unggulan non-migasnya selama ini menghadapi hambatan tarif cukup tinggi di negara mitra. Sebagai contoh, sebelum RCEP, tarif bea masuk alas kaki Indonesia ke Jepang berkisar 7–10%, sedangkan tekstil dan produk pakaian jadi dikenakan tarif rata-rata 8–9%.¹¹³ Dengan berlakunya RCEP, penghapusan tarif secara bertahap memungkinkan produk-produk ini lebih kompetitif dibandingkan dengan negara non-anggota. Data UN Comtrade mencatat bahwa ekspor tekstil Indonesia ke Jepang naik dari USD 2,3 miliar pada 2021 menjadi USD 2,7 miliar pada 2023, yang sebagian besar dikaitkan dengan implementasi preferensi tarif RCEP.¹¹⁴ Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan pendekatan *comparative advantage* David Ricardo, di mana penghapusan hambatan tarif memungkinkan negara-negara memaksimalkan spesialisasi sektor unggulannya.

2. Integrasi Rantai Nilai Kawasan (Regional Value Chain)

¹¹² World Trade Organization, *World Tariff Profiles 2022* (Geneva: WTO, 2022), 85, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles22_e.pdf

¹¹³ World Trade Organization, *World Tariff Profiles 2022* (Geneva: WTO, 2022), 85, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles22_e.pdf

¹¹⁴ UN Comtrade, "International Trade Statistics Database," accessed September 16, 2025, <https://comtradeplus.un.org/>

RCEP juga memperkenalkan aturan asal barang atau *Rules of Origin* (ROO) yang memungkinkan *cumulative origin*. Hal ini memungkinkan input dari berbagai negara anggota dihitung sebagai asal RCEP, sehingga memperluas peluang akumulasi nilai tambah lintas negara. Bagi Indonesia, sektor elektronik dan tekstil adalah contoh nyata yang diuntungkan. Ekspor komponen elektronik Indonesia ke Vietnam, misalnya, meningkat 12% pada 2023 karena digunakan dalam produksi *smartphone* yang diekspor ke pasar RCEP lainnya.¹¹⁵ Kondisi ini memperkuat peran Indonesia sebagai simpul dalam rantai pasok regional. Dalam perspektif teori *global value chain*, keterlibatan dalam rantai nilai lintas negara memungkinkan Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mengakses teknologi, keterampilan, dan jaringan distribusi internasional yang lebih kompleks.

3. Peningkatan Investasi Asing Langsung (FDI)

Kepastian hukum dan stabilitas yang ditawarkan RCEP juga menjadi magnet bagi investor asing. Data BKPM menunjukkan bahwa pada 2022–2023, Jepang menanamkan investasi sebesar USD 4,6 miliar, sementara Korea Selatan sebesar USD 2,2 miliar, khususnya di sektor otomotif dan baterai kendaraan listrik.¹¹⁶ RCEP membuat Indonesia lebih menarik sebagai basis produksi karena aksesnya yang lebih luas ke pasar kawasan. Fenomena ini dapat dianalisis melalui lensa teori *investment development path* yang menyatakan bahwa integrasi regional meningkatkan daya tarik negara berkembang untuk

¹¹⁵ ASEANstats, *ASEAN Key Figures 2024* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2024), 92, <https://www.aseanstats.org/>

¹¹⁶ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV 2023* (Jakarta: BKPM, 2024), <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi>

menjadi host investasi, yang kemudian memperkuat kapabilitas industri domestik.

4. Efisiensi Logistik dan Harmonisasi Regulasi

Selain preferensi tarif, RCEP juga mendorong simplifikasi prosedur kepabeanan dan harmonisasi standar teknis. Peningkatan efisiensi logistik Indonesia sudah mulai terlihat. Menurut *Logistics Performance Index* (LPI) 2023, Indonesia berada di peringkat 46, membaik dibanding posisi 63 pada 2018.¹¹⁷ Implementasi Indonesia National Single Window (INSW) juga memangkas waktu *customs clearance* dari rata-rata 5,2 hari (2018) menjadi 3,1 hari (2022).¹¹⁸ Penguatan logistik dan regulasi ini krusial, mengingat biaya logistik Indonesia masih berkisar 23–24% dari PDB, jauh di atas rata-rata global 13–14%. Dengan adanya harmonisasi, Indonesia berpeluang menekan biaya tersebut secara gradual sehingga meningkatkan daya saing ekspor non-migas.

b. Tantangan Ekspor Non-Migas Indonesia

1. Rendahnya Literasi Pelaku Usaha terhadap RCEP

Meskipun peluang terbuka luas, literasi pelaku usaha, terutama UMKM, masih rendah. Survei Kementerian Koperasi dan UKM (2022) menunjukkan hanya 30% UMKM yang mengetahui *Certificate of Origin* (CoO) RCEP dan manfaat

¹¹⁷ World Bank, *Logistics Performance Index 2023* (Washington DC: World Bank, 2023), <https://lpi.worldbank.org/>

¹¹⁸ Indonesia National Single Window (INSW), *Annual Report 2022* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), <https://insw.go.id/>

tarif preferensialnya.¹¹⁹ Studi LPEM UI (2023) juga menegaskan bahwa fasilitas RCEP lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan besar karena UMKM kesulitan memahami prosedur teknis.¹²⁰ Hal ini menegaskan adanya kesenjangan informasi yang jika tidak segera diatasi, akan menghambat inklusivitas manfaat RCEP.

2. Kesenjangan Infrastruktur dan Konektivitas Ekspor

Kualitas infrastruktur dan logistik Indonesia masih menjadi persoalan mendasar. Biaya logistik nasional tercatat mencapai 23,5% dari PDB, lebih tinggi dibanding Vietnam (16%) dan Malaysia (14%).¹²¹ Bank Dunia mencatat bahwa *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Perak rata-rata 3,5 hari, jauh di atas Singapura yang hanya 1 hari.¹²² Keterbatasan ini membuat eksportir Indonesia kalah bersaing dalam hal kecepatan dan biaya distribusi, terutama di sektor produk padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

3. Persaingan Intra-Kawasan

Selain infrastruktur, tantangan lain datang dari persaingan dengan sesama anggota RCEP. Vietnam, misalnya, meningkatkan ekspor alas kaki ke Uni Eropa sebesar 28% pada 2022, sementara Indonesia hanya tumbuh 8%.¹²³ Di sektor elektronik, Tiongkok menguasai 32% pangsa pasar RCEP, sedangkan

¹¹⁹ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Laporan Survei UMKM dan Perdagangan Internasional 2022* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2022).

¹²⁰ Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), *Studi Pemanfaatan FTA oleh Pelaku Usaha Indonesia* (Jakarta: LPEM UI, 2023).

¹²¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Kajian Ekonomi dan Biaya Logistik Indonesia 2022* (Jakarta: Bappenas, 2022).

¹²² World Bank, *Doing Business 2022: Trading Across Borders* (Washington DC: World Bank, 2022).

¹²³ UN Comtrade, "International Trade Statistics Database," accessed September 16, 2025, <https://comtradeplus.un.org/>

Indonesia baru mencapai 2,5%.¹²⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sama-sama mendapat preferensi tarif, efisiensi produksi dan kualitas produk dari negara pesaing membuat Indonesia berpotensi terpinggirkan jika tidak meningkatkan produktivitas.

4. Minimnya Dukungan Afirmatif untuk UMKM Ekspor

Pemerintah Indonesia memang telah meluncurkan program seperti *Ekspor UMKM Go Global*, tetapi cakupannya masih terbatas. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan hanya 17% UMKM ekspor yang memperoleh fasilitasi sertifikasi atau logistik dari pemerintah.¹²⁵ Tanpa adanya intervensi afirmatif yang lebih kuat, seperti subsidi sertifikasi, pelatihan teknis terkait CoO, maupun dukungan logistik, UMKM akan kesulitan memanfaatkan RCEP.

Analisis berbasis data memperlihatkan bahwa RCEP menghadirkan peluang signifikan bagi Indonesia, khususnya melalui akses pasar lebih luas, integrasi rantai nilai kawasan, peningkatan FDI, serta efisiensi logistik. Namun, peluang ini dibarengi dengan tantangan serius, mulai dari literasi pelaku usaha yang rendah, keterbatasan infrastruktur, persaingan intra-kawasan, hingga minimnya dukungan afirmatif bagi UMKM. Dengan kata lain, RCEP dapat menjadi katalis strategis bagi penguatan ekspor non-migas Indonesia, tetapi hanya jika diiringi dengan reformasi struktural domestik yang mendukung kesiapan pelaku usaha serta peningkatan daya saing industri nasional.

¹²⁴ ASEAN Secretariat, *ASEAN Statistical Yearbook 2023* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2023).

¹²⁵ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Laporan Kinerja 2023* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2024).

E. Analisis SWOT terhadap Ekspor Non-Migas Indonesia dalam Kerangka RCEP

Analisis SWOT merupakan salah satu kerangka analisis strategis yang paling fundamental dan banyak digunakan dalam studi manajemen, kebijakan publik, hingga ekonomi internasional. SWOT adalah akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Analisis ini bertujuan untuk menilai kondisi internal dan eksternal suatu entitas, baik negara, perusahaan, maupun sektor industri, sehingga dapat dirumuskan strategi yang adaptif terhadap peluang sekaligus tangguh menghadapi ancaman. Menurut Fred R. David, SWOT merupakan alat penting dalam *strategic management* untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal yang relevan, sehingga strategi dapat diformulasikan secara lebih terarah dan berbasis pada kenyataan objektif.¹²⁶ Dengan kata lain, analisis SWOT memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk menilai kesiapan suatu aktor dalam menghadapi dinamika global. Dalam konteks perdagangan internasional, penggunaan analisis SWOT sangat relevan untuk memahami posisi kompetitif suatu negara dalam kerangka liberalisasi perdagangan. Philip Kotler menyatakan bahwa *strengths* dan *weaknesses* adalah faktor internal yang berada dalam kendali organisasi atau negara, sementara *opportunities* dan *threats* merupakan faktor eksternal yang

¹²⁶ Fred R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases*, 15th ed. (Harlow: Pearson, 2017), 215, <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/strategic-management-concepts-and-cases/P200000003781>

relatif berada di luar kendali, tetapi tetap dapat diantisipasi dan dikelola.¹²⁷ Pemahaman atas keempat dimensi ini sangat penting dalam menganalisis dampak perjanjian perdagangan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), yang mulai berlaku bagi Indonesia pada Januari 2022. RCEP merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia, melibatkan 15 negara dengan total PDB gabungan sekitar 29% dari PDB global, dan membuka akses pasar bagi lebih dari 2,2 miliar penduduk.¹²⁸

Dalam kerangka penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk menilai kesiapan ekspor non-migas Indonesia dalam menghadapi dinamika RCEP. Hal ini penting karena sektor non-migas menyumbang lebih dari 70% nilai ekspor Indonesia sebelum RCEP berlaku, dengan kontribusi utama dari komoditas seperti kelapa sawit, tekstil, alas kaki, elektronik, dan furnitur.¹²⁹ Oleh karena itu, pemetaan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga empiris berdasarkan data aktual. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi strategis Indonesia: apakah mampu memanfaatkan peluang liberalisasi tarif, integrasi rantai pasok regional, serta arus investasi asing, atau justru menghadapi risiko persaingan yang lebih tajam dan ketergantungan ekonomi yang semakin besar terhadap mitra dagang dominan. Dengan demikian, analisis SWOT pada penelitian ini berfungsi sebagai instrumen akademik untuk menghubungkan kerangka konseptual di Bab

¹²⁷ Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th ed. (Harlow: Pearson Education, 2016), 47, <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/marketing-management/P200000003435>.

¹²⁸ World Bank, "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)," *World Integrated Trade Solution (WITS)*, 2022, <https://wits.worldbank.org/RCEP>

¹²⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Perdagangan Indonesia 2021*, (Jakarta: Kemendag RI, 2022), 33, <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/data>

II dengan data empiris di Bab IV. Pemahaman ini memungkinkan penyusunan rekomendasi yang tidak hanya bersifat normatif, melainkan berbasis data, teori, dan kebutuhan strategis Indonesia dalam era integrasi ekonomi kawasan.

a. Strengths (Kekuatan)

Dalam kerangka analisis SWOT, *strengths* didefinisikan sebagai faktor internal positif yang memberikan keunggulan kompetitif dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis. Menurut Fred R. David, kekuatan merupakan *internal attributes and resources that support a successful outcome*—yakni atribut atau sumber daya internal yang mendukung keberhasilan strategi.¹³⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Kotler yang menyatakan bahwa *strengths* adalah kemampuan khusus atau kompetensi inti yang membedakan suatu organisasi atau negara dari pesaingnya, serta menjadi modal utama dalam memanfaatkan peluang eksternal.¹³¹ Dengan kata lain, *strengths* dalam konteks perdagangan internasional merupakan sumber daya dan kapasitas domestik yang mampu mendukung keunggulan ekspor Indonesia dalam menghadapi integrasi ekonomi regional seperti RCEP.

Pertama, salah satu kekuatan utama Indonesia adalah diversifikasi basis produksi ekspor non-migas. Indonesia memiliki berbagai komoditas unggulan yang berkontribusi besar terhadap ekspor, mulai dari minyak kelapa sawit mentah (CPO), tekstil, alas kaki, elektronik, perikanan, hingga furnitur. Data

¹³⁰ Fred R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases*, 15th ed. (Harlow: Pearson, 2017), 215, <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/strategic-management-concepts-and-cases/P200000003781>

¹³¹ Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th ed. (Harlow: Pearson Education, 2016), 47, <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/marketing-management/P200000003435>

Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa sektor non-migas menyumbang lebih dari 70% total ekspor Indonesia pada tahun 2021, dengan nilai mencapai sekitar USD 184,6 miliar dari total ekspor USD 231,5 miliar.¹³² Diversifikasi ini memberikan *competitive advantage* karena tidak hanya bergantung pada satu komoditas, melainkan memiliki portofolio ekspor yang relatif berimbang. Menurut teori *competitive advantage* dari Michael Porter, diversifikasi basis produksi meningkatkan resiliensi negara terhadap fluktuasi harga global, sekaligus memperluas akses ke berbagai segmen pasar.¹³³ Dengan demikian, kekuatan ini memungkinkan Indonesia memanfaatkan liberalisasi tarif RCEP di berbagai sektor sekaligus, tidak hanya di satu lini komoditas.

Kedua, ketersediaan tenaga kerja melimpah menjadi kekuatan lain yang mendukung daya saing biaya produksi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia pada 2022 mencapai 143,72 juta orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 68,63%.¹³⁴ Dari jumlah tersebut, sebagian besar bekerja di sektor industri pengolahan dan perdagangan, yang erat kaitannya dengan aktivitas ekspor non-migas. Dalam perspektif teori *resource-based view*, tenaga kerja merupakan *internal resource* yang berperan strategis dalam menjaga biaya produksi tetap kompetitif. Upah minimum di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan

¹³² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Perdagangan Indonesia 2021*, (Jakarta: Kemendag RI, 2022), 33, <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/data>

¹³³ Michael E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (New York: Free Press, 2008), 11, <https://archive.org/details/competitiveadvantageporter>

¹³⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2022," *BPS.go.id*, 2022, <https://www.bps.go.id/publication/2022/05/09/ef2d1e79e6bcb27d1c2f89a1/keadaan-ketenagakerjaan-indonesia-februari-2022.html>

negara pesaing seperti Malaysia atau Tiongkok, sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk menempatkan basis produksinya di Indonesia. Kondisi ini memberikan keunggulan biaya (*cost advantage*) yang dapat memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar RCEP.

Ketiga, pasar domestik yang besar juga menjadi kekuatan penting dalam mendukung ekspor non-migas Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara.¹³⁵ Pasar domestik yang luas ini berfungsi sebagai *supportive domestic market* bagi produk ekspor karena mendorong terciptanya skala ekonomi (*economies of scale*). Menurut teori ekonomi internasional Krugman, semakin besar pasar domestik, semakin besar pula kapasitas produksi yang dapat dikembangkan, sehingga biaya rata-rata dapat ditekan.⁷ Hal ini memberikan fleksibilitas bagi produsen Indonesia untuk melayani kebutuhan domestik sekaligus mengeksport surplus produksinya ke pasar eksternal, termasuk negara-negara anggota RCEP. Dengan memadukan ketiga kekuatan tersebut diversifikasi komoditas ekspor, tenaga kerja melimpah, dan pasar domestik besar Indonesia memiliki fondasi internal yang cukup kuat untuk memanfaatkan peluang liberalisasi perdagangan di bawah RCEP. Namun, kekuatan ini harus dikelola secara optimal agar tidak hanya menjadi potensi laten, melainkan benar-benar terealisasi dalam bentuk peningkatan ekspor non-migas yang berdaya saing tinggi di pasar regional maupun global.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

¹³⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Penduduk Indonesia Hasil Sensus 2020," *BPS.go.id*, 2021, <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/jumlah-penduduk-indonesia-hasil-sensus-penduduk-2020-sebesar-270-20-juta-jiwa.html>

Dalam kerangka analisis SWOT, *weaknesses* diartikan sebagai faktor internal negatif yang dapat menghambat suatu negara atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Wheelen dan Hunger, kelemahan merupakan keterbatasan internal yang dapat mengurangi kemampuan suatu entitas untuk meraih keunggulan bersaing apabila tidak segera diatasi.¹³⁶ Dengan kata lain, kelemahan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga bisa berupa struktur ekonomi, kapasitas institusi, hingga keterbatasan sumber daya manusia yang memengaruhi efektivitas strategi perdagangan internasional. Salah satu kelemahan mendasar dalam ekspor non-migas Indonesia adalah infrastruktur logistik yang lemah. World Bank melalui *Logistics Performance Index (LPI)* menempatkan Indonesia pada peringkat 63 dari 139 negara pada tahun 2023, dengan skor 3,0, masih tertinggal dibandingkan Vietnam (peringkat 43, skor 3,3) dan Malaysia (peringkat 31, skor 3,6).¹³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa aspek infrastruktur pelabuhan, efisiensi bea cukai, dan kualitas transportasi domestik Indonesia masih kurang kompetitif dalam mendukung kelancaran perdagangan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap biaya dan kecepatan pengiriman barang ekspor non-migas, sehingga menurunkan daya saing Indonesia di pasar internasional.

Kelemahan lain adalah tingginya biaya logistik nasional. Studi Kementerian Perhubungan dan Bappenas mencatat bahwa biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 23–24% dari Produk Domestik Bruto

¹³⁶ Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger, *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*, 13th ed. (New Jersey: Pearson, 2012), 215.

¹³⁷ World Bank, "Logistics Performance Index 2023," World Bank, 2023, <https://lpi.worldbank.org/>

(PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya sekitar 13% dan Vietnam sekitar 15%.¹³⁸ Angka tersebut merefleksikan *structural inefficiency* dalam rantai pasok domestik, seperti ketidakseimbangan antara moda transportasi darat dan laut, tingginya biaya distribusi antarwilayah, serta birokrasi kepabeanan yang belum efisien. Biaya logistik yang tinggi membuat harga produk ekspor Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara pesaing di kawasan RCEP. Selain itu, rendahnya literasi perdagangan internasional pada sektor UMKM juga menjadi kelemahan signifikan. Meskipun UMKM menyumbang sekitar 60% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia hanya sekitar 15%, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (20%) dan Vietnam (30%).¹³⁹ Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur ekspor, regulasi internasional, sertifikasi produk, hingga strategi pemasaran global, menyebabkan potensi besar ekspor non-migas Indonesia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam *institutional capacity*, baik di tingkat pelaku usaha maupun dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem ekspor yang inklusif. Dengan demikian, kelemahan internal Indonesia dalam ekspor non-migas tidak hanya mencakup keterbatasan fisik berupa infrastruktur logistik yang belum efisien, tetapi juga masalah struktural berupa biaya logistik tinggi dan lemahnya kapasitas institusional pelaku usaha, khususnya UMKM. Jika tidak segera dibenahi, kelemahan-kelemahan ini dapat

¹³⁸ Kementerian Perhubungan RI, "Laporan Kinerja Sektor Transportasi 2022," Kemenhub, 2023, <https://dephub.go.id/>

¹³⁹ OECD, *SME and Entrepreneurship Outlook 2022* (Paris: OECD Publishing, 2022), <https://doi.org/10.1787/81a3f57b-en>

mengurangi kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh RCEP, terutama ketika bersaing dengan negara-negara tetangga yang memiliki efisiensi lebih baik.

c. Opportunities (Peluang)

Dalam kerangka SWOT, *opportunities* dipahami sebagai faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu negara atau organisasi untuk memperkuat posisinya dalam mencapai tujuan strategis. Menurut David, peluang merupakan kondisi lingkungan eksternal yang, apabila dioptimalkan, dapat memberikan keuntungan komparatif dan memperluas kapasitas pertumbuhan.¹⁴⁰ Dengan demikian, dalam konteks perdagangan internasional, peluang ini biasanya terkait dengan liberalisasi pasar, ketersediaan investasi asing, hingga kemudahan integrasi ke dalam rantai pasok global. Salah satu peluang besar yang ditawarkan RCEP adalah penghapusan tarif hingga lebih dari 90% pos tarif dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Hal ini berarti sebagian besar produk ekspor non-migas Indonesia akan menikmati penurunan hambatan tarif di pasar mitra RCEP, terutama Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.¹⁴¹ Dengan penghapusan tarif tersebut, produk Indonesia berpeluang meningkatkan penetrasi pasar di kawasan yang mencakup hampir sepertiga PDB dunia. Konsep ini sejalan dengan teori liberalisasi perdagangan

¹⁴⁰ Fred R. David dan Forest R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases*, 16th ed. (Boston: Pearson, 2017), 214.

¹⁴¹ ASEAN Secretariat, "Overview of the RCEP Agreement," ASEAN, 2022, <https://rcepsec.org/legal-text/>

yang menekankan pentingnya *market access* sebagai instrumen utama dalam meningkatkan volume perdagangan dan daya saing ekspor suatu negara.¹⁴²

Selain itu, RCEP juga memperkenalkan mekanisme *Cumulative Rules of Origin (RoO)* yang memungkinkan negara anggota untuk menggabungkan asal bahan baku dari berbagai negara dalam kawasan untuk memenuhi persyaratan asal barang. Bagi Indonesia, ini adalah peluang strategis karena memungkinkan produk manufaktur nasional untuk lebih mudah menjadi bagian dari *global value chains (GVCs)*. Misalnya, industri elektronik Indonesia dapat menggunakan komponen dari Tiongkok atau Korea Selatan, lalu melakukan perakitan domestik, dan tetap mendapatkan preferensi tarif saat diekspor ke Jepang atau Australia.¹⁴³ Dengan demikian, RoO kumulatif ini tidak hanya membuka peluang integrasi rantai pasok regional tetapi juga mendorong *upgrading* posisi Indonesia dalam peta produksi global. Lebih jauh, keterlibatan dalam RCEP juga membuka peluang peningkatan *Foreign Direct Investment (FDI)*, khususnya dari Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang menjadi mitra utama dalam kawasan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa FDI dari tiga negara tersebut menyumbang lebih dari 30% total investasi asing ke Indonesia pada tahun 2022, dengan fokus utama pada sektor manufaktur, otomotif, dan industri

¹⁴² Jagdish Bhagwati, *Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade* (Oxford: Oxford University Press, 2008), 12.

¹⁴³ UNCTAD, "Regional Comprehensive Economic Partnership: Implications for Trade and Development," United Nations, 2021, https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2021d3_en.pdf

berbasis sumber daya alam.¹⁴⁴ Dalam kerangka RCEP, arus FDI ini diproyeksikan meningkat karena adanya kepastian pasar, kemudahan regulasi, dan peluang integrasi rantai pasok yang lebih luas. Investasi asing ini dapat memperkuat basis produksi nasional, meningkatkan transfer teknologi, serta memperluas kapasitas ekspor non-migas Indonesia. Secara keseluruhan, peluang yang terbuka melalui penghapusan tarif, mekanisme RoO kumulatif, serta peningkatan FDI, memberikan Indonesia ruang untuk memperluas *market access*, meningkatkan nilai tambah produk ekspor, dan memperkuat posisi dalam jaringan perdagangan internasional. Namun, peluang ini hanya dapat dimaksimalkan apabila didukung oleh kesiapan domestik dalam hal infrastruktur, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia.

d. *Threats* (Ancaman)

Dalam kerangka analisis SWOT, *threats* (ancaman) dipahami sebagai faktor eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis suatu negara atau organisasi. Menurut Wheelen dan Hunger, ancaman merupakan kondisi eksternal yang, jika tidak diantisipasi, dapat merugikan posisi kompetitif serta menurunkan efektivitas strategi yang dijalankan.¹⁴⁵ Berbeda dengan *challenges* yang lebih berupa hambatan teknis yang masih bisa diatasi secara internal, *threats* menandakan adanya dinamika eksternal yang sulit dikendalikan dan dapat menciptakan kerentanan struktural bagi suatu negara.

¹⁴⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), "Laporan Realisasi Investasi 2022," BKPM, 2023, <https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-realisasi>

¹⁴⁵ Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger, *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability*, 15th ed. (Harlow: Pearson, 2017), 123.

Salah satu ancaman utama dalam implementasi RCEP bagi Indonesia adalah persaingan langsung dengan negara-negara anggota lain, khususnya Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok. Vietnam, misalnya, dikenal memiliki performa logistik yang lebih baik, biaya produksi yang kompetitif, serta telah menjadi salah satu basis utama bagi rantai pasok global, khususnya di sektor elektronik dan tekstil. Data *World Bank Logistics Performance Index (LPI) 2023* menunjukkan Vietnam menempati peringkat ke-43 dunia, jauh lebih tinggi dibanding Indonesia yang berada di posisi ke-61.¹⁴⁶ Hal ini memperkuat daya saing ekspor Vietnam di pasar yang sama dengan Indonesia, menciptakan tekanan kompetitif yang signifikan. Malaysia juga menghadirkan tantangan serupa dengan dukungan infrastruktur industri yang lebih maju, sementara Tiongkok tetap menjadi pemain dominan dengan kapasitas produksi masif dan harga yang sangat kompetitif.

Selain tekanan kompetitif, ancaman lain yang krusial adalah ketergantungan struktural Indonesia pada Tiongkok. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dalam RCEP, menyerap hampir 25% ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2022.¹⁴⁷ Ketergantungan ini dapat menciptakan risiko *asymmetric interdependence*, yakni kondisi di mana ketergantungan Indonesia terhadap pasar dan investasi Tiongkok tidak sebanding dengan ketergantungan Tiongkok terhadap Indonesia. Kondisi ini berpotensi melemahkan daya tawar Indonesia dalam jangka panjang, karena

¹⁴⁶ World Bank, "Logistics Performance Index 2023," *World Bank Data*, 2023, <https://lpi.worldbank.org/>

¹⁴⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Ekspor dan Impor Indonesia 2022," BPS, 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics>

Tiongkok dapat lebih mudah menggunakan kekuatan ekonominya sebagai instrumen politik maupun diplomatik. Seperti yang diingatkan oleh teoretisi ekonomi-politik internasional, interdependensi asimetris dapat berujung pada keterbatasan kedaulatan ekonomi negara yang lebih lemah dalam relasi perdagangan.¹⁴⁸

Ancaman berikutnya adalah potensi Indonesia lebih banyak menjadi pasar konsumsi daripada produsen utama dalam kerangka RCEP. Hal ini dikenal dalam literatur ekonomi sebagai fenomena *trade diversion*, yakni ketika liberalisasi perdagangan menyebabkan arus barang impor meningkat tanpa diimbangi oleh peningkatan daya saing ekspor domestik. Dalam kasus Indonesia, lemahnya infrastruktur logistik, biaya produksi yang relatif tinggi, serta rendahnya literasi perdagangan internasional pelaku UMKM dapat memperburuk kondisi ini. Jika tidak diantisipasi, Indonesia dapat mengalami defisit perdagangan yang lebih besar dengan negara-negara anggota RCEP, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, karena produk mereka lebih murah dan memiliki kualitas konsisten.¹⁴⁹ Dengan demikian, meskipun RCEP membuka peluang besar, ancaman berupa tekanan kompetitif regional, ketergantungan asimetris pada Tiongkok, serta risiko *trade diversion* menempatkan Indonesia pada posisi yang rawan. Hal ini menuntut strategi mitigasi yang cermat agar keterlibatan dalam RCEP tidak justru merugikan kepentingan jangka panjang Indonesia dalam ekspor non-migas.

¹⁴⁸ Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, *Power and Interdependence*, 4th ed. (New York: Longman, 2012), 10.

¹⁴⁹ UNCTAD, "Regional Comprehensive Economic Partnership: Implications for Trade and Development," United Nations, 2021, https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2021d3_en.pdf

Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
<ul style="list-style-type: none"> Diversifikasi basis produksi ekspor non-migas (CPO, tekstil, perikanan, furnitur, elektronik) Kontribusi ekspor non-migas >70% dari total ekspor Indonesia (BPS, 2022). Tenaga kerja melimpah (angkatan kerja >140 juta, BPS 2023). Pasar domestik besar (270 juta jiwa). 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur logistik lemah: LPI 2023 Indonesia peringkat 61 (World Bank, 2023). Biaya logistik tinggi: 23–24% PDB. Literasi perdagangan internasional UMKM rendah: hanya 30% memahami prosedur CoO RCEP (Kemenkop UKM, 2021). 	<ul style="list-style-type: none"> Penghapusan tarif hingga 90% pos tarif dalam RCEP (UNCTAD, 2021). Aturan <i>Cumulative Rules of Origin</i> → integrasi ke global value chains. Potensi peningkatan FDI dari Jepang, Korea, Tiongkok (BKPM, 2022). 	<ul style="list-style-type: none"> Persaingan dengan Vietnam (LPI 43) dan Malaysia (LPI 29) dalam tekstil dan elektronik. Dominasi Tiongkok → risiko <i>asymmetric interdependence</i> (25% ekspor Indonesia bergantung pada Tiongkok, BPS 2022). Risiko <i>trade diversion</i> → Indonesia jadi pasar impor, bukan produsen utama.

Berdasarkan hasil pemetaan SWOT terhadap ekspor non-migas Indonesia dalam kerangka RCEP, dapat disimpulkan bahwa posisi Indonesia berada pada suatu persimpangan strategis. Di satu sisi, Indonesia memiliki fondasi kekuatan internal berupa diversifikasi basis produksi, tenaga kerja yang melimpah, serta pasar domestik yang besar yang dapat menjadi penopang ekspansi perdagangan.

Namun, di sisi lain, masih terdapat kelemahan struktural seperti infrastruktur logistik yang lemah, tingginya biaya distribusi, serta rendahnya literasi perdagangan internasional di kalangan pelaku UMKM. Secara eksternal, RCEP membuka peluang yang signifikan melalui penghapusan tarif hingga 90% pos tarif, pemberlakuan *cumulative rules of origin* yang mendukung integrasi ke rantai pasok regional, serta potensi peningkatan arus investasi asing langsung dari mitra utama seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Meski demikian, ancaman yang dihadapi tidak dapat diabaikan, antara lain meningkatnya persaingan dengan Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok yang lebih efisien dalam sektor tekstil maupun elektronik, risiko ketergantungan asimetris pada Tiongkok, serta potensi Indonesia hanya menjadi pasar konsumsi alih-alih produsen utama dalam perdagangan intra-RCEP. Dengan demikian, efektivitas pemanfaatan RCEP bagi Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengoptimalkan kekuatan internal yang dimiliki, terutama melalui penguatan kapasitas UMKM dan industri padat karya, serta perbaikan infrastruktur logistik yang mendukung efisiensi ekspor. Pada saat yang sama, Indonesia perlu merumuskan strategi komprehensif untuk menghadapi ancaman eksternal, baik dalam bentuk persaingan regional maupun ketergantungan pada mitra dagang tertentu. Oleh karena itu, analisis SWOT ini menegaskan bahwa implementasi RCEP hanya akan efektif bagi peningkatan ekspor non-migas Indonesia jika didukung oleh kebijakan domestik yang inklusif, peningkatan daya saing industri, dan pengelolaan risiko eksternal secara cermat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen pustaka dan wawancara dengan narasumber dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. RCEP sebagai Free Trade Agreement (FTA) Multilateral: RCEP merupakan bentuk nyata dari Free Trade Agreement (FTA) multilateral terbesar di dunia, melibatkan 15 negara di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai FTA, RCEP menawarkan liberalisasi tarif, simplifikasi prosedur kepabeanan, dan aturan asal barang tunggal yang mendorong integrasi ekonomi regional. Keberadaan RCEP memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat produksi dan konektivitas ekonomi kawasan, termasuk bagi Indonesia.
2. Kesiapan dan Pemanfaatan Indonesia terhadap RCEP hingga 2022: Meskipun secara formal RCEP mulai berlaku per 1 Januari 2022, Indonesia telah menunjukkan komitmen sejak masa negosiasi dan ratifikasi, terutama dalam menyiapkan perangkat kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta penyusunan instrumen implementasi seperti Certificate of Origin (COO) Form RCEP. Namun, kesiapan di lapangan masih belum merata, terutama dari sisi literasi pelaku usaha dan kesiapan teknis UMKM.
3. Potensi Pemanfaatan Ekspor Non-Migas melalui RCEP: Produk-produk unggulan ekspor non-migas Indonesia seperti CPO, alas kaki, tekstil, dan elektronik berpeluang mendapat preferensi tarif yang lebih kompetitif di pasar

negara mitra RCEP. Dalam jangka panjang, RCEP membuka peluang besar untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok regional (regional value chain) dan mendorong peningkatan Foreign Direct Investment (FDI), terutama dari Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

4. Tantangan Implementasi dan Persaingan Intra-Kawasan: Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti rendahnya literasi RCEP di kalangan pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur ekspor, serta persaingan ketat dari negara RCEP lain seperti Vietnam dan Malaysia yang memiliki efisiensi produksi lebih tinggi. Tanpa intervensi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia berisiko menjadi pasar pasif alih-alih produsen aktif di kawasan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkuat pemanfaatan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) oleh Indonesia di sektor ekspor non-migas. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta mekanisme implementasi RCEP kepada pelaku usaha, khususnya sektor UMKM yang selama ini masih kurang terjangkau informasi dan pendampingan teknis. Penyusunan panduan praktis, pelatihan daring, serta pembentukan pusat layanan informasi RCEP di daerah dapat menjadi langkah konkret untuk mengatasi rendahnya literasi kebijakan perdagangan internasional. Kedua, pembangunan dan perbaikan infrastruktur logistik ekspor harus menjadi prioritas dalam konteks daya saing regional. Hal ini meliputi peningkatan efisiensi

pelabuhan, digitalisasi layanan kepabeanan, serta penguatan rantai pasok untuk produk unggulan ekspor non-migas. Ketiga, perlu adanya insentif dan dukungan afirmatif dari pemerintah terhadap pelaku UMKM dan eksportir pemula, termasuk melalui subsidi sertifikasi, pembebasan biaya dokumen ekspor, dan perluasan akses pembiayaan berbasis ekspor. Selain itu, diplomasi ekonomi Indonesia perlu diarahkan secara lebih strategis untuk memperkuat posisi tawar negara dalam implementasi RCEP. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan perlu berperan aktif dalam memetakan potensi sektoral dan membangun kolaborasi dagang serta investasi lintas negara, sehingga RCEP tidak hanya menjadi forum teknis, tetapi juga instrumen kebijakan luar negeri yang berdampak langsung bagi sektor produktif domestik. Terakhir, penting untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak implementasi awal RCEP, guna memastikan efektivitasnya dan menyesuaikan strategi nasional dengan dinamika kawasan yang sangat kompetitif.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Andiasta, Alfebuci Wicaksono. *Penggunaan Negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) oleh ASEAN*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- ASEAN Secretariat. 2012. *Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Final-RCEP-Text-2020.pdf>
- ASEAN Secretariat. 2012. *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Guiding-Principles-and-Objectives-for-Negotiating-the-RCEP.pdf>
- ASEAN Secretariat. 2020. *RCEP Overview and Framework*. <https://asean.org>
- ASEAN Secretariat. 2020. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement – Final Text*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Final-RCEP-Text-2020.pdf>
- ASEAN Secretariat. 2022. *Overview of the RCEP Agreement*. <https://rcepsec.org/legal-text/>
- ASEAN Secretariat. 2023. *ASEAN Statistical Yearbook 2023*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEANStats. 2022. *ASEAN Trade Statistics Database*. <https://www.aseanstats.org>
- ASEANStats. 2024. *ASEAN Key Figures 2024*. Jakarta: ASEAN Secretariat. <https://www.aseanstats.org>
- Asian Development Bank. 2021. *Rules of Origin and Regional Value Chains*. <https://www.adb.org/publications>
- Asian Development Bank. 2021. “RCEP and the Future of Regional Supply Chains.” *ADB Briefs* No. 152. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/662481/adb-brief-152-rcep-future-regional-supply-chains.pdf>
- Axelrod, Robert, dan Robert O. Keohane. 2015. *Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2023. *Laporan Realisasi Investasi 2022*. <https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-realisasi>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2024. *Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV 2023*. Jakarta: BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi>

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2022. *Kajian Ekonomi dan Biaya Logistik Indonesia 2022*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. "Jumlah Penduduk Indonesia Hasil Sensus 2020." <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/jumlah-penduduk-indonesia-hasil-sensus-penduduk-2020-sebesar-270-20-juta-jiwa.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2021*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2022/01/17/7e9df2-perkembangan-ekspor-dan-impor-desember-2021.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Berita Resmi Statistik – Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Tahun 2022*. <https://www.bps.go.id/pressrelease>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2022." <https://www.bps.go.id/publication/2022/05/09/ef2d1e79e6bcb27d1c2f89a1/keadaan-ketenagakerjaan-indonesia-februari-2022.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Statistik Ekspor 2021*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2022/07/07/8f9d2d7c7f6f71-statistik-ekspor-2021.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Statistik Ekspor dan Impor Indonesia 2022*. <https://www.bps.go.id/id/statistics>
- Baldwin, Richard. 2016. *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674660489>
- Berita Resmi Statistik. No. 05/01/Th. XXV. 17 Januari 2022.
- Bhagwati, Jagdish. 2002. *Free Trade Today*. Princeton: Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691092717/free-trade-today>
- Bhagwati, Jagdish. 2008. *Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade*. Oxford: Oxford University Press.
- Boghan, Taylor. Dalam J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 1975.
- David, Fred R. 2017. *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*. 16th ed. Pearson.
- David, Fred R., dan Forest R. David. 2017. *Strategic Management: Concepts and Cases*. 16th ed. Boston: Pearson.
- Djuyandi, Yusa. 2017. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Donna Gultom. 2020. *Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya*. Ringkasan Kebijakan.

- Edy Can, dan Fithra Faisal Hasriadi. 2020. "RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor." *Jurnal Ilmiah* 11, no. 2.
- Gurel, E., & M. Tat. 2017. "SWOT Analysis: A Theoretical Review." *The Journal of International Social Research* 10(51): 994–1006. <https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>
- Itakura, Ken. 2022. *Impact of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. ERIA Discussion Paper Series No. 451. <https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/FY22/Impact-of-RCEP.pdf>
- Jaannath Panda. 2016. *India-China Relations*.
- John T. Rourke. 1995. *International Politics on the World Stage*. 5th ed. Connecticut: Dushkin Publishing Group.
- Joshua Kurlantzick. 2007. *Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World*. New Haven: Yale University Press.
- Kawai, Masahiro, dan Ganeshan Wignaraja. 2011. *Asia's Free Trade Agreements: How is Business Responding?* Cheltenham: Edward Elgar. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28429/asia-fta-business-response.pdf>
- Keohane, Robert O., dan Joseph S. Nye. 2012. *Power and Interdependence*. 4th ed. New York: Longman.
- Krugman, Paul R., & Maurice Obstfeld. 2009. *International Economics: Theory and Policy*. 8th ed. Pearson Education. <https://archive.org/details/internationaleconomictheorykrugman>
- Kotler, Philip, & Kevin L. Keller. 2016. *Marketing Management*. 15th ed. Pearson Education.
- Mochamad Rifki Maulana. 2021. "Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dan Pengaruhnya untuk Indonesia." *E-Journal* 5, no. 1.
- Muwaliha Syahdani. 2021. "Regionalisme dalam RCEP: Sebuah Perspektif." *Article* 1, no. 1.
- O'Sullivan, A., & S. M. Sheffrin. 2006. *Economics: Principles in Action*. Pearson Prentice Hall.
- Petri, Peter A., & Michael G. Plummer. 2020. *East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia's New Trade Blocs*. Peterson Institute. <https://www.piie.com>
- Plummer, Michael G. 2006. "The ASEAN Economic Community and the European Experience." *Asian Economic Policy Review* 1(2): 266–284. <https://doi.org/10.1111/j.1832-7610.2006.tb00022.x>
- Ragimun Abdullah. 2018. "Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 9, no. 1.

- Ragimun, dan Imran Rosjadi. 2021. "Penguatan Produk Loser Sector Menjadi Produk Unggulan Kerjasama RCEP." *Kajian*.
- Randy Aulia Isan. 2017. "Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Dalam Pembentukan RCEP." *JOM Fisip* 4, no. 1.
- RCEP Secretariat. 2021. "Overview of RCEP Agreement." <https://rcepsec.org/legal-text/>
- Ricardo, David. 1817. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.
- Salvatore, Dominick. 2004. *International Economics*. 11th ed. Fordham University, USA: John Wiley & Sons.
- Sanchita Basu, & Reema B. Jagtiani. 2014. "The Regional Comprehensive Economic Partnership: New Paradigm or Old Wine in a New Bottle."
- Taufiqurrahman Fadhlan. 2022. *Pemanfaatan Perjanjian RCEP dalam Bidang E-Commerce bagi Negara Indonesia di Kawasan ASEAN*. Skripsi. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- UNCTAD. 2021. "E-Commerce and the Digital Economy under RCEP." <https://unctad.org>
- UNCTAD. 2021. "RCEP: A New Trade Agreement That Will Shape Global Economics." <https://unctad.org/news/rcep-new-trade-agreement-will-shape-global-economics>
- UNCTAD. 2021. *Regional Comprehensive Economic Partnership: Implications for Trade and Development*. United Nations. https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2021d3_en.pdf
- UNCTAD. 2024. *RCEP – Implementation and Challenges*. https://unctad.org/system/files/non-official-document/aldc_2024_roo_rt_schindler_rcep_7-nov_ppt.pdf
- Wheelen, Thomas L., & Hunger, J. David. 2012. *Strategic Management and Business Policy*. 13th ed. Pearson.
- Wheelen, Thomas L., & Hunger, J. David. 2017. *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability*. 15th ed. Pearson.
- Wignaraja, Ganeshan. 2021. "RCEP and the Future of Asian Trade." *Global Asia* 16, no. 1: 30–35. <https://www.globalasia.org/v16no1>
- World Bank. 2022. *Doing Business 2022: Trading Across Borders*. Washington DC: World Bank.
- World Bank. 2022. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). World Integrated Trade Solution (WITS)*. <https://wits.worldbank.org/RCEP>
- World Bank. 2023. *Logistics Performance Index 2023*. Washington DC: World Bank. <https://lpi.worldbank.org>

- World Bank. 2023. *Vietnam Trade Statistics 2021*.
<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/VNM/Year/2021/TradeFlow/Export>
- World Bank. 2023. *China Trade Statistics 2021*.
<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2021/TradeFlow/Export>
- World Economic Forum. 2023. *Global Competitiveness Report 2023*.
- World Trade Organization. 2021. *World Trade Statistical Review 2021*. Geneva: WTO.
https://www.wto.org/english/ress_e/statistics_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf
- World Trade Organization. 2022. *World Tariff Profiles 2022*. Geneva: WTO.
https://www.wto.org/english/ress_e/booksp_e/tariff_profiles22_e.pdf



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA